

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING
DI KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan

Untuk mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

ANUGRAH RACHMAT

E 121 10 255

JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

BANTAENG ANALISIS KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING
DI KABUPATEN

yang diajukan oleh:

Anugrah Rachmat

E121 10 255

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.A. Gau Kadir, M.A

NIP.195708181984031002

Dr. Hj. Nurlinah, M.Si

NIP.196309211987022001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si

NIP. 196412311989031027

LEMBAR PENERIMAAN

Skripsi

BANTAENG ANALISIS KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING

DI KABUPATEN BANTAENG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Anugrah Rachmat

E121 10 255

telah diperbaiki

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015

Menyetujui :

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. H.A.Gau Kadir, M.A	(.....)
Sekretaris	: Rahmatullah, S.Ip, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Hj. Nurlina, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Rabina Yunus, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H.A.Gau Kadir, M.A	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Nurlina, M.Si	(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Penanaman Modal Asing.....	10
2.1.1 Pengertian Penanaman Modal Asing.....	11
2.1.2. Kriteria Penanaman Modal di Indonesia.....	11
2.1.3. Tahapan Penanaman Modal.....	12
2.1.4. Posisi Pemerintah Daerah dalam Investasi	14
2.2. Teori Modernisasi.....	14
2.3. Teori Pertumbuhan.....	16
2.4. Teori Dependensi.....	23
2.5. Konsep Analisis Kebijakan.....	25
2.5.1. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan.....	25
2.5.1.1 Analisis Kebijakan Prospektif	25

2.5.1.2 Analisis Kebijakan Retrospektif	26
2.5.1.3 Analisis Kebijakan Terintegrasi	27
2.6. Kerangka Pemikiran.	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian.	36
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian.	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data.	37
3.4. Informan Penelitian.	38
3.5. Analisis data.	38
3.6. Defenisi Operasional.	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng.	40
4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	40
4.1.2. Klimatologi.....	41
4.1.3 Hidrologi.	42
4.1.4. Demografi.....	42
4.1.5. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng.....	46
4.1.6 Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	49
4.2. Model Investasi di Kabupaten Bantaeng.	51
4.2.1 Posisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Investasi.	51
4.2.2. Jenis-jenis Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng.....	55
4.2.3. Pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng.....	61
4.2.4. Model Kerja Sama Investasi di Kabupaten Bantaeng.	63

4.3.	Prospek Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng.....	71
4.3.1.	KIBA sebagai Manifestasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng.....	72
4.3.2.	Analisis Prospek Penanaman Modal Asing terhadap Ketengakerjaan di Kabupaten Bantaeng.....	83

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	94
5.2.	Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan yang Dilintasi.....	42
Tabel 4.2: Perkembangan Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan Se Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 – 2012.....	44
Tabel 4.3 :Data Penduduk Kabupaten Bantaeng Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008 – 2012.....	45
Tabel 4.4 : Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD.....	49
Tabel 4.5 : Daftar investor Kawasan Industri – Bantaeng Industrial Park (Per Oktober 2014).	56
Tabel 4.6 : Bagan Identifikasi Model Kerja Sama Investasi.	69
Tabel 4.7 : Peciptaan Kesempatan Kerja langsung dan Tidak langsung Melalui BIP.....	75
Tabel 4.8 : Jumlah Angkatan Kerja,Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten BantaengTahun 2013.	77
Tabel 4.9 : Jumlah Pencari Pekerjaan dan Angka Pengangguran (Unemployment Rate-UER) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013.	78
Tabel 4.10 : Distribusi Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng 2013.	80
Tabel 4.11 : kelebihan dan kekeurangan Kawasan Industri Bantaeng.	84

DAFTAR GAMBAR.

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Bantaeng.	41
Gambar 4.2 : Bagan Siklus Join Venture.	71

INTISARI

Anugrah Rachmat, Nomor Induk **E12110255**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul “ Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng”. Di bawah bimbingan Dr. H. Andi Gau Kadir, M.A sebagai pemimbing I dan Dr. Hj.Nurlinah, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model investasi penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng.

Teknik analisis yang dipakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di Kabupaten Bantaeng yaitu penanaman modal langsung dengan kerja sama Joint Venture (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sector ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng.

ABSTRACT

Anugrah Rachmat , ID Number **E12110255** , Governance Studies Program , Faculty of Social and Political Sciences , University of Hasanuddin , Making thesis with the title " Analysis of Foreign Investment Policy in Bantaeng " . Under the guidance of Dr. Andi H. Gau Kadir , MA as pemimbing I and Dr. Hj.Nurlinah , M.Si as mentors II

This study aims to portray the model invetasi foreign investment and know its prospects in Bantaeng .

Teknnik analysis used is qualitative , ie to describe and explain the results of research in the form of words spoken or written . Data collection was done using a technique sttudi literature , observation , interview and search data online .

Based on the results of this study indicate that the model Bantaeng namely investment in capital planting directly with the cooperation of the Joint Venture (a joint venture) that manages Bantaeng Industrial Area . Based on the advantages and disadvantages of existing , foreign investment prospects is manifested by Industrial Estate Bantaeng against employment sector is very promising because it can open up employment opportunities for the community Bantaeng .

KATA PENGANTAR

Assalamu Aalikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Maha Sempurna yang mencurahkan segala rahmat-Nya yang diangurehkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga sebuah keniscayaan yang diberikan-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ **Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di kabupaten Bantaeng**” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam atas Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam sang revolusioner sejati yang akan terus menjadi panutan bagi manusia dan seluruh makhluk alam semesta. Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis tidak akan ada apa-apanya ketika tidak bantuan dari beberapa pihak yang memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung demi proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan penuh rasa tulus dan hormat kepada :

1. Ibu Prof. Dwia Aristina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. H. Andi Alimuddin Unde, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. Andi Gau Kadir, M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. H. Andi Gau Kadir, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing II yang telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dosen FISIP Unhas, khususnya dosen Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam menggali dalamnya ilmu pengetahuan.
6. Pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya Bupati Bantaeng, Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Tambang beserta staf, Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta staf, Kepala Bappeda beserta staf dan Direktur Perusda Kabupaten Bantaeng yang telah membantu dan memberikan data kepada penulis terkait penelitian ini.
7. Diperuntukkan untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Abd.Azis dan Ibunda Dra.St.Rahmawati,AR yang tercinta atas segala limpahan kasihnya yang tak terhingga diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami nilai-nilai kehidupan. Peluh keringatmu In Shaa Alllah akan anandamu bayarkan dengan sebuah kesuksesan. Doa keselamatan senantiasa penulis akan selalu panjatkan.
8. Adik-adik penulis, Nurfitri Wahyuni, Wahyu Triansyah dan Idil Multazam, terima kasih atas segala cinta kasih yang kalian curahkan dalam ikatan persaudaraan.
9. Keluarga besarku Fam H.Hamido dan Fam Abd. Rasyid terima kasih atas segala perhatian yang telah kalian berikan kepada penulis.
10. Kepada teman, sahabatku , saudaraku, bahkan lebih dari itu Ika Wahyuni, panjang kisah akhirnya kita kembali dipertemukan semoga ini yang terkahir untuk sebuah perjalanan panjang kelak nantinya. Skripsi ini kupersembahkan untuk sebuah pembuktian awalku kalau penulis juga bisa berproses di ruang yang lain.
11. Untuk Tante (ibunya Uni) dan sekeluarga, terima kasih atas segala perhatian yang kalian berikan kepada penulis.

12. Saudara-saudaraku di keluarga kecil Volksgeist 2010 : Isar, Eca, Wandu ,Acil ,Adam, Ucup, Mail, Wahyu, Arfan, Ayyub, Firman, Bolang, Megy, Lulu, Ika,Eka, Yaya, Nely, Evy, Nana, Meta, Dina, Tanti, Yeni, Novi, Kiki, Sari, Dian, Tuti, dan terkhusus untuk Riska, Nio, Amal, Kasbi, Ricardo, Bondan, Tasbi, Wawan, Rimba, Akbar, Cau, Harry, Ryan, Novri, Nasar d serta Accang, maaf saya harus mendahului kalian bendera angkatan ini saya mandatkan kepada saudara Accang sebagai Ketua Angkatan Volksgeist Perjuangan. Banyak kisah yang telah ukir bersama dan kisah itu tidak terbatas antara ruang dan waktu, semoga segala usaha kita semua akan bermuara pada titik kesuksesan masing-masing.
13. Keluarga Besar Rumah Orange Himapem: Kanda -kanda Revolusioner(05), Rez-Publica (06), Renaissance (07), Glasnost (08), Aufklarung(09) terima kasih atas segala didikannya yang diberikan kepada penulis, dan untuk Adinda-adindaku Enlightenment (11), Fraternity(12), Lebensrum (13) penulis titipkan Rumah Jingga dipundakkan kalian. Rumah ini bakalan selalu ada di dalam ruang rindu. **SALAM MERDEKA MILITAN.**
14. Untuk para mentor-mentorku selama berproses Kak Iswan,Kak Bahri, Kak Rizal,Kak Hary, Kak Wawan,Kak Ulla, Kak Anci, Kak Erwin, Kak Ridwan,Kak Rudi, Kak Upi, Kak Uman,Kak Edi, Kak Eca terima kasih atas segala transformasi nilai dan ilmu yang kalian berikan kepada penulis, terkhusus untuk Kanda Adi Hexatanic terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang penuh dengan keterbatasan.
15. Kawan-kawan seperjuangan Sospol 2010: Azhar, Dadang, Andra, Bob, Wira, Rangga, Evan, Ryan dkk maaf saya akhiri perjuanganku, lanjutkanlah

perjuanganmu kawan, “Setidaknya Kita sudah Berjuang”. BERSAMA BERSATU BERJAYA.

16. Teman-teman Komplekz Community: Azwar, Indar, Nojeng, Abdi dkk terima kasih atas persaudaraan yang selama ini terjalin.
17. Keluarga Besar KKN Gel. 87 Kabupaten Bone Kecamatan Tellu Siattinge Desa Lamuru (Petta Desa, Ibu Aji, Rani, Angga, Ical Kordes, Vika, Ari, Indra, Aii dan Ifa) terima kasih atas kenangan yang telah terukir.
18. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas segalanya. Semoga umur panjang akan menjadi obat rindu yang mepertemukan kita dikemudian hari.

Amien Yaa rabbal Alamin

Semoga Skripsi ini dapat memberikan faedah terhadap beberapa pihak, utanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan cahaya-Nya kepada kita semua.

Makassar, 18 Januari 2015.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya, negara berkembang diperhadapkan pada suatu kondisi yang inferior, baik ditinjau dari manusia maupun materialnya, seperti kemiskinan, produktifitas yang rendah, sumber daya alam yang kurang terolah, sumber daya manusia yang kurang terampil dan semuanya itu merupakan akumulasi dari sifat keterbelakangan dibandingkan dengan negara-negara maju. Inferioritas tersebut mengakibatkan sulitnya negara berkembang membangun perekonomiannya sehingga ketergantungan terhadap negara-negara maju akan semakin dibutuhkan. Tak dapat disangkal, bahwa pengaruh hubungan luar negeri, dalam hal ini kerjasama internasional, memberi andil yang begitu besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dasar tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam berbagai kerjasama internasional. Indonesia diperhadapkan pada keterbatasan modal, teknologi, dan manajemen dalam pembangunan ekonominya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan ingin mencoba untuk dapat membangun negaranya sendiri. Untuk mencapai keinginan tersebut, Indonesia perlu membuka diri dengan berhubungan dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya, terutama dalam ekonomi nasionalnya. Hal ini dapat

dimaklumi, oleh karena Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang membangun, belum memiliki keseimbangan kemampuan antara tuntutan beban pembangunan dengan kemampuan finansialnya. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduk yang cukup banyak dituntut untuk memenuhi tuntutan pembangunan nasionalnya, tetapi di sisi lain, pemerintah Indonesia belum memiliki kemampuan modal yang memadai.

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Kesemua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan rumusan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

Timbulnya keinginan untuk menarik investor, yang dimulai sejak jaman orde baru hingga sekarang. Tetapi pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sedia kala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah mengundang masuknya investasi asing di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU No.1 Tahun 1967. Dengan adanya Investasi Asing maka akan berpengaruh terhadap APBN, karena APBN menggambarkan sumber pendapat dan alokasi belanja negara, maka pinjaman dari modal asing akan berfungsi menambah sumber pembiayaan Negara untuk dijadikan sektor-sektor perekonomian negara agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, sehingga memberi kontribusi kepada Negara maupun masyarakatnya melalui hasil-hasil pembangunan di berbagai sector dan daerah di Indonesia.

Penanaman modal asing atau biasa disebut dengan investasi sama halnya seperti pisau bermata dua yang jika dikelola dengan baik akan membawa manfaat yang sangat besar akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan membawa dampak sebaliknya. Ada dua argumen yang saling bertentangan dalam menganalisis penanaman modal asing sehingga terkadang kehadiran penanaman modal asing sering terjadi pendapat pro dan kontra mengenai peranannya dalam pembangunan.

Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan (faktor-faktor

penentu) pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini, penanaman modal asing (dan juga bantuan luar negeri) merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di Negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Sedangkan argument yang menentang penanaman modal asing mendasarkan sikapnya pada pemikiran dan keyakinan akan pentingnya pengawasan nasional terhadap segenap aktivitas perekonomian domestik serta pada usaha mengurangi dominasi dari hubungan ketergantungan antara pemerintahan Negara-negara Dunia Ketiga dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat kuat tersebut. Mereka pada umumnya memandang perusahaan-perusahaan raksasa multinasional itu bukan sebagai agen perubahan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat Negara-negara Dunia Ketiga, melainkan merupakan mesin-mesin yang bersifat anti pembangunan. Alasannya, perusahaan-perusahaan multinasional justru cenderung memperkuat struktur ekonomi yang dualistis dan memperburuk distribusi pendapatan.

Pasca kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia mengalami kontraksi domestic. Semangat reformasi dan pembaharuan melahirkan koreksi menyeluruh terhadap system kenegaraan orde baru yang bersifat otoriter dan represif. Berbagai aturan dan formulasi ditawarkan dalam membenahi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi selama 32 tahun. Salah satunya

adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi daerah untuk mengembalikan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang telah menetapkan dasar-dasar system hubungan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip desentralisasi, dekonstrasi dan tujuan pembantuan yang di masa orde baru terabaikan implementasinya. Namun dalam kurung waktu lima tahun diundangkannya, undang-undang ini dinilai tidak efektif sehingga memaksa penggodokan ulang terhadap undang-undang ini dan akhirnya melahirkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mengedepankan asas desentralisasi. Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri yang didelegasikan dari pemerintah pusat . Dengan adanya kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri, maka setiap daerah berhak untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing. Setiap daerah dapat membuat inovasi atau melakukan terobosan-terobosan tertentu dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Masing-masing daerah mengatur arah pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sekaligus bertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan tersebut kepada masyarakat di daerah tersebut.

Kabupaten Bantaeng sebagai daerah otonom berupaya untuk membangun daerahnya dengan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng. Hal ini ditandai dengan ada masuknya beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng melalui beberapa sektor contohnya di sektor pertambangan yaitu investasi smelter pengolahan biji nikel yang dilakukan oleh perusahaan multikorporasi seperti: PT Bhakti Bumi Sulawesi ,PT Home Industri Indonesia, PT Yinyi Indonesia Mining Investmen dan lain-lain.

Dengan masuknya investasi di Kabupaten Bantaeng diharapkan ini membawa dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Bantaeng dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantaeng. Tentunya dalam setiap pembangunan akan membawa beberapa dampak perubahan pada daerah yang dicanangkan pembangunan melalui investasi sehingga pemerintah hendaknya mampu menjadi pengendali dari arus investasi tersebut agar dampak positif dari investasi mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu menularkan trend positif tersebut hingga ke lapisan sektor ekonomi lainnya dan mampu menekan dampak negative dengan perencanaan penanggulangan yang matang. Hal ini tertuang dalam UU No.25 pasal 27 ayat 1 tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal yang berbunyi :

“Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah

dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan instansi daerah, maupun antar pemerintah daerah” serta pasal 30 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang berbunyi “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah”.

Melalui representasi 2 pasal diatas dengan mempertimbangkan pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya seperti yang termaktub dalam undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004, posisi strategis pemerintah kabupaten bantaeng dalam arus penanaman modal asing menuntut perencanaan serta analisis yang matang dari berbagai sektor.

Penanaman modal asing ke daerah kabupaten atau kota bukanlah menjadi hal baru di Indonesia, sehingga bagaimana investasi berjalan serta dampaknya dapat dilihat dari beberapa daerah yang telah terlebih dahulu bersentuhan dengan modal asing semisal pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara membawa dampak positif terhadap perekonomian di sekitar perusahaan tambang, yaitu meningkatkan pendapat per bulan, memberikan peluang kerja dan usaha sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat. Di sisi lain kegiatan pertambangan batu bara juga membawa dampak yang negative dan positif terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan. Dampak negatifnya adalah kehadiran perusahaan tambang meningkatkan konflik antara masyarakat dan perusahaan yang dipicu oleh masalah limbah, penerimaan tenaga kerja, masalah tumpang tindih lahan, dan tidak optimalnya perusahaan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, keberadaan perusahaan batu bara memberikan dampak terhadap menurunnya aktifitas masyarakat terhadap keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong terutama kerja bakti dan kegiatan keagamaan, tetapi memberikan dampak positif terhadap kepedulian bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu yang tak kalah menarik perhatian yaitu PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Berkaca dari beberapa kondisi diatas, dan jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan kondisi bahwa ternyata penanaman modal asing bukanlah sebuah janji muluk tanpa resiko terhadap kemandirian sebuah daerah otonom maka perlu adanya telaah yang lebih mendalam tentang penanaman modal asing di kabupaten bantaeng guna meminimalisir dampak yang tidak diharapkan dalam pencapaian tujuan bernegara serta secara langsung akan meningkatkan potensi keberhasilan pemerintah kabupaten dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui penanaman modal asing maka penulis akan mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng”

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam proposal ini adalah pengaruh penanaman modal asing terhadap beberapa sektor potensial yang ada di Kabupaten Bantaeng, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut :

1. Bagaimana model investasi penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng?.
2. Bagaimana prospek investasi penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan model investasi di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui prospek investasi penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi para peminat maupun peneliti lain, serta para mahasiswa ilmu pemerintahan yang hendak melaksanakan penelitian tentang penanaman modal asing.
2. Sebagai bahan informasi dan menjadi bahan pertimbangan, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di bidang pembangunan perekonomian dan pengembangan wilayah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Penanaman Modal Asing

2.1.1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 1 yang berbunyi :

“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri Bentuk penanaman modal asing”.

Terdapat dua bentuk investasi dalam penanaman modal asing, diantaranya pertama adalah *Portofolio Investment* yaitu arus modal internasional dalam bentuk asset-aset finansial seperti saham (*stock*), obligasi dan *commercial papers* lainnya. Kedua adalah *Direct Investment* yaitu investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku dan persediaan dimana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. *Direct Investment* ini biasanya dimulai dengan pendirian *subsidiary* atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan.

2.1.2. Kriteria Penanaman Modal di Indonesia

Penanaman modal asing di Indonesia harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sebagaimana yang tetuang dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2, Undang-undang Penanaman Modal Asing, yaitu :

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
 - e. kebersamaan
 - f. efesiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;

- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. megolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Tahapan Penanaman Modal

Secara umum, berikut adalah tahapan yang harus dilalui untuk melakukan investasi asing di Indonesia yakni :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini atau Tahap Persiapan (istilah yang digunakan BKPM), permohonan diajukan kepada BPKM tentang rencana penanaman modal asing sekaligus juga langsung mengurus izin prinsip pada fase ini. Menyediakan data dari (calon) investor yang akan melakukan investasi PMA: memberikan informasi tentang bisnis yang akan dikerjakan, modal yang akan diinvestasikan, rencana produksi, proyeksi omset, jumlah tenaga kerja dan nama-nama pemegang saham dari (calon) perusahaan PMA. Bila permohonan rencana penanaman modal asing diterima, BKPM akan mengeluarkan izin prinsip (IP), yang

menjadi dasar untuk mengimplementasikan permohonan rencana PMA. Adapun lama proses pengurusan izin prinsip bias mulai dari 4-7 hari.

2. Tahap Kedua : Tahap Kontruksi

Pada tahap ini, merealisasikan rencana yang sudah dicantumkan di izin prinsip. Misalnya, bila perusahaan PMA belum ada, maka harus mendirikan PT. PMA sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah dengan melengkapi seluruh dokumen, fasilitas, sarana dan pra-sarana untuk merealisasikan rencana PMA. Ini termasuk sewa atau bangun kantor, pembuatan PT PMA, urus surat keterangan domisili usaha, pengesahan PT PMA, NPWP, izin gangguan (bila diperlukan), UKL/UPL atau AMDAL, API-P, API-U, dan lain-lain. Data-data ini kemudian digunakan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT). Pada tahap ini bisa juga diajukan permohonan pembebasan pajak atas mesin-mesin yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari PT PMA .. Tidak semua jenis bisnis bisa mendapatkan fasilitas ini sehingga bisa berkonsultasi dengan konsultan PMA tentang jenis bisnis yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Semua dokumen yang terkait dengan konstruksi dilakukan pada tahap kedua.

3. Tahap Ketiga : Tahap Operasi/Produksi

Bila dokumen pada tahap kedua sudah siap dan usaha siap atau 85 persen siap untuk beroperasi, selanjutnya mengajukan permohonan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT). Semua dokumen (copy) yang

disiapkan pada tahap kedua diserahkan ke BKPM. Bila semua dokumen sudah dinyatakan ok, BKPM akan menerbitkan izin usaha tetap (IUT).

2.1.4. Posisi Pemerintah Daerah Dalam Investasi

Posisi pemerintah daerah dalam kebijakan investasi ini tertuang seperti dalam UU No.25 pasal 27 ayat 1 tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal yang berbunyi “Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antarinstansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan instansi daerah, maupun antarpemerintah daerah” serta pasal 30 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang berbunyi “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2.2. Teori Modernisasi

Teori ini didasarkan pada dikotomi antara apa yang disebut modern dan apa yang disebut tradisional. Yang modern merupakan simbol dari kemajuan, pemikiran yang rasional, cara kerja yang efisien, dsb. Masyarakat modern dianggap sebagai ciri dari masyarakat di negara-negara industri maju. Sebaliknya yang tradisional merupakan masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berpikir yang irrasional serta cara kerja yang tidak efisien. Ini merupakan ciri masyarakat pedesaan yang didasarkan pada usaha pertanian di negara-negara miskin.

Teori modernisasi didasarkan pada faktor-faktor non material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor-faktor ini menjelma dalam alam psikologi individu, atau nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi penduduk dalam memberikan arah kepada tingkah-lakunya. Faktor-faktor non material atau dunia ide ini dianggap sebagai faktor yang mandiri, yang bisa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dunia ide dengan dunia ide yang lain. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk mengubah psikologi seseorang atau nilai-nilai budaya sebuah masyarakat. Dalam perkembangannya, memang ada teori yang juga menekankan aspek kondisi material, seperti misalnya teori Hoselitz (yang menekankan pembentukan lembaga-lembaga yang menunjang proses modernisasi), atau Inkeles dan Smith (yang menekankan lingkungan kerja sebagai cara untuk menciptakan manusia modern).

Teori-teori seperti ini memang merupakan teori peralihan ke Teori Struktural, meskipun persoalan yang dibahas berlainan. Teori modernisasi biasanya bersifat a-historis. Hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal. Dia dapat diberlakukan tanpa memperhatikan faktor waktu ataupun faktor tempat. Misalnya tentang prinsip rasionalitas atau efisiensi. Ada kecenderungan dari teori-teori ini untuk beranggapan bahwa teori ini dapat diberlakukan kapan saja dan dimana saja. Konteks masyarakat dan perkembangan masyarakat tersebut sepanjang sejarah kurang mendapat perhatian. Ada anggapan

bahwa masyarakat bergerak secara garis lurus atau *unilinear*, dari sesuatu yang irrasional menjadi rasional. Misalnya, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Gejala ini dianggap sebagai suatu yang universal, yang berlaku di masyarakat manapun, pada segala waktu.

Masyarakat yang belum modern adalah masyarakat yang terbelakang, sesuai dengan perkembangan dalam garis lurus tersebut. Pada saatnya masyarakat ini akan menjadi modern seperti yang dialami oleh negara-negara Eropa. Dengan demikian, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari di dalam negara-negara itu sendiri, bukan diluar. Misalnya, kurangnya pendidikan pada sebagian besar penduduknya, adanya nilai-nilai lokal yang kurang menghargai kekayaan material, dan sebagainya

2.3. Teori Pertumbuhan

Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh W.W. Rostow yang pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam *economic journal* dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya; *The Stage Of Economic Growth*. Menurut Rostow proses perkembangan ekonomi dasar dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya. Kelima tahap pertumbuhan itu adalah ;

1. Masyarakat Tradisional (*the traditional society*).

Rostow mengartikan tahap masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang didalam fungsi produksi yang terbatas, yang didasarkan kepada teknologi, ilmu pengetahuan, dan sikap masyarakat sebelum masa Newton. Yang dimaksud oleh Rostow dengan masyarakat sebelum masa Newton adalah suatu masyarakat yang masih menggunakan cara-cara berproduksi yang relatif primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh nilai-nilai yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun.

Menurut Rostow, dalam suatu masyarakat tradisional tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas pe-kerja masih sangat terbatas, oleh sebab itu sebagian sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor ini, struktur sosialnya sangat bersifat hierarkis, yaitu anggota masyarakat mempunyai kemungkinan yang sangat kecil sekali untuk mengadakan mobilitas secara vertikal. Maksudnya disini, kedudukan seseorang dalam masyarakat akan berbeda dengan kedudukan ayahnya, kakenya, dan nenek moyangnya. Kecil sekali kemungkinan seorang anak petani menjadi tuan tanah atau kelas masyarakat lain yang lebih tinggi dari petani. Jadi hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap organisasi yang tedapat dalam masyarakat dan dalam menentukan kedudukan sesorang dalam masyarakat.

Mengenai kegiatan politik dan pemerintahan dalam tahap masyarakat tradisional, Rostow menggambarkan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, pusat dari kekuasaan politik terdapat di daerah-daerah, ditangan tuan-tuan tanah yang berkuasa dalam berbagai daerah. Kebijaksanaan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah di berbagai daerah tersebut.

2. Prasyarat untuk lepas landas (*the precondition for take-off*).

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan ciri-ciri penting dari suatu masyarakat: yaitu perubahan dalam sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakatnya, dan struktur kegiatan ekonominya. Apabila perubahan-perubahan seperti itu muncul, maka proses pertumbuhan ekonomi dapatlah dikatakan sudah mulai berlaku (wujud). Suatu masyarakat yang telah mencapai taraf proses pertumbuhan demikian sifatnya, yaitu pertumbuhan ekonomi sudah lebih sering terjadi, sudah bolehlah dianggap sebagai berada pada tahap prasyarat untuk lepas landas. Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai suatu masa transisi pada ketika dimana suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya, untuk dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustained growth*). Menurut Rostow pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara otomatis.

Tahap prasyarat untuk untuk lepas landas dibedakan oleh Rostow dalam dua bentuk. Yang pertama adalah prasyarat lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika; yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Bentuk yang kedua adalah yang dicapai oleh negara –negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia baru, yang dapat mencapai tahap prasyarat lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional karena masyarakat di negara-negara itu terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh sesuatu masyarakat untuk tahap prasyarat lepas landas.

3. Lepas landas (*take off*).

Dalam tahap lepas landas, pertumbuhan merupakan peristiwa yang selalu terjadi. Awal dari masa lepas landas adalah masa berlangsungnya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Jadi faktor penyebabnya dimulainya masa lepas landas berbeda-beda. Yang penting, sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini secara teratur akan tercipta pembaruan-pembaruan (*innovations*) dan peningkatan penanaman modal. Dan, penanaman modal yang makin bertambah tinggi tingkatnya ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional menjadi bertambah cepat dan akan melangkahi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan perkapita makin lama akan menjadi makin bertambah besar.

Tiga ciri tahap lepas landas:

1. Terwujudnya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari lebih kurang 5 persen menjadi 10 persen dari Produk Nasional Neto (Neto National Product atau NNP).
2. Terjadinya peningkatan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi.
3. Adanya suatu Platform politik, sosial, dan institusional baru yang akan menjamin berlangsungnya segala tuntutan perluasan di sektor modern, dan potensi ekonomi eksternal (external economies) yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas, sehingga pertumbuhan dapat terus-menerus berjalan.

Dalam ciri yang ke-tiga di atas termasuk pula kemampuan untuk mengerahkan modal dari sumber-sumber dalam negeri, karena kenaikan tabungan dalam negeri besar sekali peranannya dalam menciptakan tahap lepas landas. Inggris dan Jepang misalnya, mencapai masa lepas landas tanpa sedikitpun mengimpor modal.

Rostow menekankan tentang perlunya kenaikan tingkat penanaman modal sebagai prasyarat untuk mencapai lepas landas karena hanya dengan terciptanya keadaan tersebut perekonomian dapat berkembang lebih laju daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Misalkan suatu perekonomian mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1 sampai 1,5 persen dan rasio modal produksinya (capital output ratio) adalah 3,5 persen dari pendapatan nasional hanya untuk menjaga agar

tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami penurunan. Tingkat penanaman modal sebesar itu akan menciptakan pertambahan dalam pendapatan nasional sebesar 1 sampai 1,5 persen, berarti sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, untuk menciptakan kenaikan tingkat pendapatan perkapita, tingkat penanaman modal yang diperlukan haruslah lebih besar dari 5,25 persen

4. Gerakan ke arah kedewasaan (*the drive to maturity*),

Tahap pembangunan yang berikut adalah gerakan ke arah kedewasaan, yang diartikan oleh Rostow sebagai: masa di mana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya.

Dalam tahap ini sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut, sektor-sektor pelopor baru akan muncul untuk menggantikan pelopor lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin pada tahap gerakan ke arah kedewasaan coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat tahap lepas landas yang berlaku, dan juga oleh bentuk kebijakan pemerintah.

Dalam menganalisis ciri-ciri tahap gerak ke arah kedewasaan, Rostow menekankan penelaahannya kepada corak perubahan sektor pemimpin dan sektor industri pelopor di beberapa negara yang sekarang ini telah menjadi negara maju, dan ia menunjukkan bahwa di tiap-tiap negara tersebut jenis-jenis sektor pemimpin pada tahap sesudah lepas landas berbeda dengan yang ada pada tahap lepas landas. Di Inggris,

misalnya, industri-industri kecil yang telah mempelopori pembangunan pada tahap lepas landas telah digantikan oleh industri besi, batu bara, dan peralatan teknik berat. Sedangkan di Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman dimana pengembangan jaringan jalan kereta api memegang peranan penting dalam menciptakan pembangunan pada tahap lepas landas, telah digantikan perannya sebagai sektor pelopor oleh industri baja dan industri peralatan berat.

Selanjutnya Rostow menyinggung ciri-ciri yang bersifat non-ekonomi dari masyarakat yang telah mencapai tahap gerakan ke arah kedewasaan dan yang hampir memasuki tahap berikutnya. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri bertambah penting, sedang sektor pertanian menurun. Kemahiran dan kepandaian para pekerja bertambah tinggi;
2. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer profesional kian bertambah penting dan menggantikan kedudukan pengusaha yang merangkap jadi pemilik.
3. Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi. Dan kritik-kritik terhadapnya mulai timbul.

5. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*)

Tahap terakhir dalam teori pertumbuhan Rostow adalah tahap konsumsi tinggi, yaitu masa dimana perhatian masyarakat lebih

menekankan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi kepada masalah produksi. Dalam tahap ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dan dukungan politik, yaitu:

1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri, dan kecenderungan ini umumnya berwujud penaklukan negara-negara lain.
2. Menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan progresif. Dalam sistem perpajakan seperti ini, makin tinggi pendapatan makin besar pula tingkat pajak atas peningkatan itu.
3. Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan utama yang sederhana seperti makanan, pakaian, dan perumahan menjadi konsumsi barang-barang tahan lama dan mewah.

2.4. Teori Dependensi

Teori dependensi menolak premis dan asumsi-asumsi yang diajukan oleh teori modernisasi. Teori dependensi dilandasi oleh strukturalisme yang beranggapan bahwa kemiskinan yang terdapat di negara-negara Dunia Ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, dimana yang kuat (Raul Prebisch: Negara Pusat) melakukan eksploitasi terhadap yang lemah (negara-negara Pinggiran). Maka,

surplus dari negara-negara Dunia Ketiga (negara pinggiran) beralih ke negara-negara industri maju (negara Pusat) .Teori struktural sendiri berpangkal pada filsafat materialisme Marx, namun sekaligus teori ketergantungan membantah tesis Marx yang menyatakan bahwa kapitalisme akan menjadi cara produksi tunggal, dan menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama disemua negara yang ada didunia ini. Prebisch yang pemikirannya dilanjutkan oleh Baran, berpendapat bahwa kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi morban imperialisme, tidak sama dengan perkembangan kapitalisme dari negara-negara kapitalisme yang menyentuhnya. Kapitalisme di negara-negara pinggiran merupakan kapitalisme yang sakit, yang sulit berkembang dan memiliki dinamika yang berlainan.

Adapun ciri-ciri dari teori ini yaitu :

1. Yang menjadi hambatan dari pembangunan bukanlah ketiadaan modal, melainkan pembagian kerja internasional yang terjadi. Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan keterbelakangan merupakan faktor eksternal;
2. Pembagian kerja internasional ini diuraikan menjadi hubungan antara dua kawasan, yakni pusat dan pinggiran. Terjadi pengalihan surplus dari negara pinggiran ke pusat.
3. Akibat pengalihan surplus ini, negara-negara pinggiran kehilangan sumber utamanya yang dibutuhkan untuk membangun negerinya. Surplus ini dipindahkan ke negara-negara pusat. Maka, pembangunan

dan keterbelakangan merupakan dua aspek dari sebuah proses global yang sama. Proses global ini adalah proses kapitalisme dunia. Dikawasan yang satu, proses itu melahirkan pembangunan, dikawasan lainnya keterbelakangan.

4. Sebagai terapinya, Teori ketergantungan menganjurkan pemutusan hubungan dengan kapitalisme dunia, dan mulai mengarahkan dirinya pada pembangunan yang mandiri. Untuk ini, dibutuhkan sebuah perubahan politik yang revolusioner, yang bisa melakukan perubahan politik yang radikal. Setelah faktor eksternal ini disingkirkan, diperkirakan pembangunan akan terjadi melalui proses alamiah yang memang ada di dalam masyarakat negara pinggiran.

2.5. Konsep Analisis Kebijakan

2.5.1. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

2.5.1.1. Analisis Kebijakan Prospektif

Hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan: analisis prospektif, retrospektif dan terintegrasi. Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem dan peneliti operasi. Analisis kebijakan prospektif mungkin paling baik dicontohkan dari deskripsi oleh Walter Williams, mantan kepala Divisi Penelitian dan Perencanaan pada Kantor Kesempatan Ekonomi (*the*

Office of Economic Opportunity). Analisis kebijakan menurut Williams,” merupakan suatu alat untuk mensitesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternative dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan; secara konseptual tidak termasuk *mengumpulkan* informasi.; Sebaliknya *penelitian* kebijakan berkenaan dengan “semua studi yang menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan fenomena dan/atau menentukan hubungan diantara mereka

2.5.1.2. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif dalam banyak hal sesuai dengan deskripsi penelitian kebijakan yang dikemukakan sebelumnya. Analisis retrospektif, yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis:

- 1. Analisis yang berorientasi pada disiplin** (*Discipline-oriented analysts*). Kelompok ini sebagian besar terdiri dari para ilmuwan politik dan sosiologi, terutama berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori dan merengkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan.
- 2. Analisis yang berorientasi pada masalah** (*Problem-oriented analysts*). Kelompok ini sebagian besar juga terdiri dari para ilmuwan

politik dan sosiologi, dan juga berusaha untuk menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan.

3. Analis yang berorientasi pada aplikasi (*Applications-oriented analysts*). Kelompok analis yang ketiga ini mencakup ilmuwan politik dan sosiologi, tetapi juga orang-orang yang datang dari bidang studi professional pekerjaan social dan administrasi public dan bidang studi sejenis seperti penelitian evaluasi. Kelompok ini juga berusaha untuk menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program public, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar.

2.5.1.3. Analisis Kebijakan Terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan yang diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk secara terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Hal ini berarti bahwa analis dapat terlibat dalam transformasi komponen-komponen informasi kebijakan searah putaran jarum jam berulang kali sebelum akhirnya pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan.

2.6. Kerangka Pemikiran

Modernisasi dalam Ekonomi Politik biasanya dihubungkan dengan suatu model pembangunan yang dijalankan oleh Negara sedang berkembang ataupun terbelakang, melalui pola transformasi pembaruan tertentu yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Negara bangsa yang bersangkutan. Memang tidak salah bahwa modernisasi merupakan sebuah bentuk transformasi peradaban dunia, khususnya perubahan social dan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bersumber dari semangat *renaissance-aufklarung*. Yang memberi penitisan terhadap munculnya berbagai revolusi penting di dunia. Arus perubahan sosial dalam konteks ini adalah adanya pembaruan kebudayaan tingkah laku dari tradisional menjadi kontemporer karena perkembangan industrialisasi sebagai model pembangunan menjadi primadona dunia khususnya di Negara-negara sedang berkembang.

Modernisasi yang tengah berlangsung di Negara-negara Dunia Ketiga, dengan *trend* industrialisasi, pada dasarnya merupakan akumulasi dari kepentingan Negara bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Kejayaan suatu Negara yang berhasil mempopulerkan modernisasi sangat berpengaruh terhadap kedudukan regim yang berkuasa dan berkorelasi pula terhadap kelanggengan kekuasaannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan ingin mencoba untuk dapat membangun negaranya sendiri. Untuk mencapai keinginan tersebut Indonesia membuka diri dengan

berhubungan dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya tertuma dalam ekonomi nasionalnya. Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang membangun, belum memiliki keseimbangan kemampuan antara tuntutan beban pembangunan dengan kemampuan finansialnya. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduk yang cukup banyak dituntut untuk memenuhi tuntutan pembangunan nasionalnya, tetapi di sisi lain, pemerintah Indonesia belum memiliki kemampuan modal yang memadai.

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Kesemua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan rumusan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

Penanaman modal asing atau biasa disebut dengan investasi sama halnya seperti pisau bermata dua yang jika dikelola dengan baik akan membawa manfaat yang sangat besar akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan membawa dampak sebaliknya. Ada dua argumen yang saling bertentangan dalam menganalisis penanaman modal asing

sehingga terkadang kehadiran penanaman modal asing sering terjadi pendapat pro dan kontra mengenai peranannya dalam pembangunan.

Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru memustkan perhatiannya pada berbagai determinan (factor-faktor penentu) pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini, penanaman modal asing (dan juga bantuan luar negeri) merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di Negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Sedangkan argument yang menentang penanaman modal asing mendasarkan sikapnya pada pemikiran dan keyakinan akan pentingnya pengawasan nasional terhadap segenap aktivitas perekonomian domestik serta pada usaha mengurangi dominasi dari hubungan ketergantungan antara pemerintahan Negara-negara Dunia Ketiga dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat kuat tersebut. Mereka pada umumnya memandang perusahaan-perusahaan raksasa multinasional itu bukan sebagai agen perubahan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat Negara-negara Dunia Ketiga, melainkan merupakan mesin-mesin yang bersifat anti pembangunan. Alasannya, perusahaan-perusahaan multinasional justru cenderung memperkuat struktur ekonomi yang dualistis dan memperburuk distribusi pendapatan.

Kabupaten Bantaeng sebagai daerah otonom berupaya untuk membangun daerahnya dengan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng. Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng melalui beberapa sektor contohnya sektor pertambangan. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang matang dari Pemerintah Daerah Kabupten Bantaeng karena tentunya bakalan bersinggungan dengan sektor-sektor potensial yang lainnya yang ada seperti: pertanian,perikanan,pendidikan dan ketenagakerjaan.

Penanaman modal asing ke daerah kabupaten atau kota bukanlah menjadi hal baru di Indonesia, sehingga bagaimana investasi berjalan serta dampaknya dapat dilihat dari beberapa daerah yang telah terlebih dahulu bersentuhan dengan modal asing semisal pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara membawa dampak positif terhadap perekonomian di sekitar perusahaan tambang, yaitu meningkatkan pendapat per bulan, memberikan peluang kerja dan usaha sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat. Di sisi lain kegiatan pertambangan batu bara juga membawa dampak yang negative dan positif terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan.Dampak negatifnya adalah kehadiran perusahaan tambang meningkatkan konflik antara masyarakat dan perusahaan yang dipicu oleh masalah limbah, penerimaan tenaga kerja, maslah tumpang tindih lahan, dan tidak optimalnya perusahaan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, keberadaan perusahaan batu bara memberikan dampak terhadap menurunnya aktifitas masyarakat terhadap keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong terutama kerja bakti dan kegiatan keagamaan, tetapi memberikan dampak positif terhadap kepedulian bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu yang tak kalah menarik perhatian yaitu PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi serta yang terjadi di Kabaena Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, menurunnya pendapatan di sektor perikanan karena disebabkan oleh pencemaran limbah dari tambang sehingga merusak biota laut yang menjadi habitat ikan yang menjadi bahan tangkapan nelayan.

Dalam relasinya dengan sector ketenagakerjaan, investasi asing yang pada umumnya didominasi oleh sector pertambangan menjanjikan terbukanya peluang yang besar dalam penyerapan tenaga kerja yang tentu saja dapat stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 secara jelas tertuang bahwa salah satu tujuan dari penanaman modal asing adalah meningkatkan tingginya peluang kerja bagi angkatan kerja di setiap sector yang menjadi obyek pengelolaannya tidak terkecuali bagi Kabupaten Bantaeng, adanya

investasi asing di Kabupaten Bantaeng sudah barang tentu akan membuka lapangan kerja baru bagi warga Kabupaten Bantaeng.

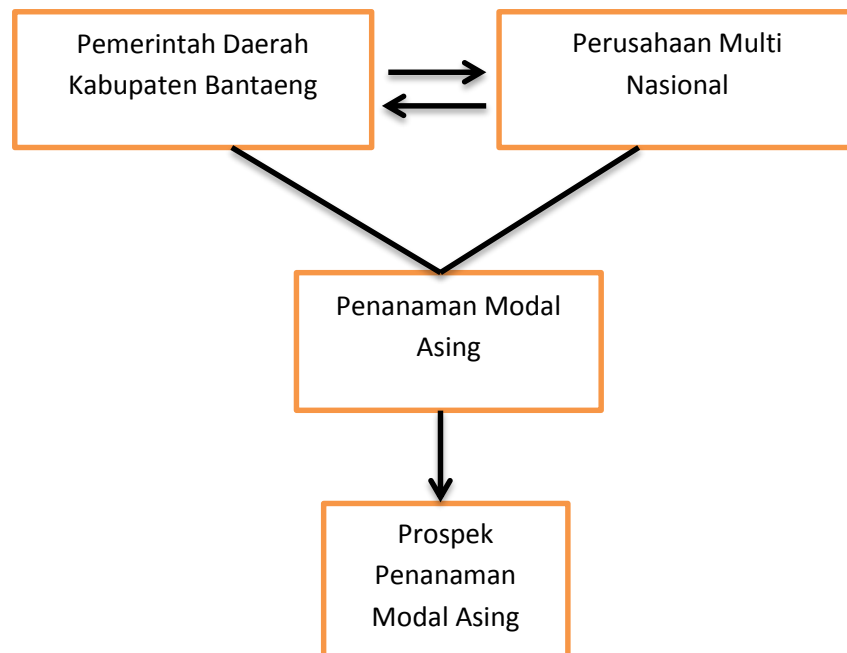
Lebih lanjut, seperti hal yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penanaman modal asing merupakan pisau bermata dua apabila tidak dikelola secara proporsional dan professional justru dapat mengakibatkan kerugian besar bagi negara penerimanya. Tidak terkecuali dalam sector ketenagakerjaan merupakan masalah pelik dalam setiap kehidupan bernegara dikarenakantingginya kebutuhan kerja, oleh masyarakat tidak diimbangi dengan lapan kerja yang mencukupi terlebih lagi melihat realita bahwa di era industrialisasi seperti sekarang ini dimana modernitas dan kemajuam teknologi harus diimbangi dengan pendidikan dan skill akan menjadi hal yang lumrah terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat pendidikan yang tidak merata dan sebagian besar tidak menguasai laju teknologi maka akan menjadi kendala tersendiri dalam peluangnya meningkatkan tenaga kerja local dalam investasi asing.

Bantaeng sendiri dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relative rendah, dapat diasumsikan mengalami kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan kerja masyarakat di era modern seperti ini. Terlebih lagi dalam berbagai kasus di beberapa investasi asing bahwa penyerapan tenaga kerja lebih diprioriraskan pada tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas. Namun di sisi lain pertumbuhan sector produksi baru dapat merangsang pertumbuhan sector ekonomi lainnya di

akibatkan oleh semakin tingginya permintaan terhadap suplai bahan baku dan sumber daya untuk menopang kontinuitas produksi dari obyek investasi itu sendiri. Ironi yang kemudian muncul adalah fakta-fakta bahwa Bantaeng sebenarnya tidak memiliki sumber daya alam yang cukup menjanjikan selain sector pertanian dan perikanan sehingga dalam pengelolaan investasi di Bantaeng sendiri masih terikat pada suplay sumber daya dari luar, jika terhambat secara langsung dapat berimbas pada stabilitas tenaga kerja yang dapat mengganggu prospek ketenagakerjaan di kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu untuk menilai tingkat keberhasilan sebuah target perlu lebih dahulu diidentifikasi kelebihan dan kekurangan investasi Kabupaten Bantaeng terhadap sector ketenagakerjaan. Hal tersebut sesuai dengan model analisa prospek.

Dari penjelasan diatas skema penulisan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bantaeng dengan pertimbangan bahwa yang diteliti yaitu strategi Bupati Bantaeng dalam membuat perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng.

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksploratif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi ini untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Penelitian eksploratory pada umumnya dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan "Apa (*what*)" (Apa sesungguhnya fenomena sosial tersebut?). Pada penelitian ini seringkali menggunakan data-data kualitatif.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui :
 - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - b. Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder diperoleh melalui :
 - a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang

dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya²⁶.

3.4. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman tentang penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bupati Kabupaten Bantaeng
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tambang
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng
5. Direktur Perusda Kabupaten Bantaeng

3.5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun *study literature* untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

3.6. Defenisi Operasional

Guna menghindari terjadinya salah interpretasi hal-hal yang akan dianalisa dalam penelitian ini maka ditentukan beberapa batasan penelitian dan focus penelitian melalui beberapa indicator sebagai berikut:

1. Model penanaman modal asing yang dimaksud adalah model/bentuk kerja sama investasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka penanaman modal asing.
2. Prospek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelebihan dan kekurangan penanaman modal asing dalam sector ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng yang dikenal dengan sebutan “ Butta Toa” terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 395,83 km. Terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, 67 Desa dan kelurahan, 502 Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga (RT).

Kedepalan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Pajukukang, Uluere, Gantarangkeke dan Kecamatan Sinoa. Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 76,99 km atau 19,45 persen dari luas Kabupaten Bantaeng, sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 28,85 km.

4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42"-120°05'27" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut.. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian

selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- c. Sebelah Selatan : Laut Flores
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

4.1.2. Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Bantaeng hampir merata disetiap bulan dalam setahun, jumlah hari hujan berdasarkan data tahun 2012 mencapai rata-rata 4,42 hari per bulan dengan jumlah hari hujan dalam setahun sebanyak 53 hari dalam setahun, sedangkan curah hujan dalam setahun mencapai sebesar 169,33 mm.

Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Bantaeng



Sumber: DDA Kabupaten Bantaeng

4.1.3. Hidrologi

Sebagai daerah dengan luas yang relative terbatas atau hanya kurang lebih 0,8% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Bantaeng hanya memiliki 11 sungai yang melintasi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun sungai sungai dimaksud antara lain :

Tabel 4.1: Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan yang Dilintasi

Nama Sungai	Panjang	Kecamatan yang Dilintasi
Pamosa	1,7	Pajukukang
Turung Asu	7,4	Tompobulu, Gantarangkeke,
Balang Sikuyu	10,8	Uluere, Sinoa, Bissappu
Panaikang	11,7	Uluere, Sinoa, Bissappu
Kalamassang	14,2	Tompobulu, Gantarangkeke,
Lemoa	14,4	Uluere, Bissappu
Kaloling	17,1	Tompobulu, Gantarangkeke,
Biangkeke	20,4	Tompobulu, Gantarangkeke,
Calendu	20,7	Uluere, Bantaeng
Bialo	43,3	Uluere, Tompobulu
Nipa-Nipa	25,1	Tompobulu, Gantarangkeke,

Sumber : Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Bantaeng, Tahun 2011

4.1.4. Demografi

Untuk periode tahun 2007 – 2011 jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng dalam lima tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan peningkatan, bahkan mencapai diatas rata-rata Sulawesi Selatan. Pertumbuhan penduduk diatas rata-rata Sulawesi Selatan tersebut secara umum mengindikasi pergerakan ekonomi daerah dari aktifitas penduduk disektor riil cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng mencapai diatas 2,40% jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Sulawesi selatan yang hanya mencapai sebesar 1,57% (BPS Sulsel, 2012).

Permasalahan penyajian data jumlah penduduk selama ini, terdapat kecenderungan perbedaan antar jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2012 berjumlah sebanyak 185,675 jiwa atau lebih tinggi dibanding data BPS yang hanya berjumlah 179.505 jiwa yang terdiri atas 86.950 jiwa penduduk laki-laki dan 92.555 jiwa penduduk perempuan dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 453 jiwa / Km² pada tahun 2012.

**Tabel 4.2: Perkembangan Jumlah Penduduk Masing-Masing
Kecamatan Se Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 – 2012**

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bantaeng	35.913	36.191	36.718	37.08	37.301
2	Bissappu	30.254	30.487	30.931	31.24	31.422
3	Tompobulu	22.422	22.591	22.913	23.14	23.277
4	Uluere	10.576	10.657	10.814	10.92	10.986
5	Sinoa	11.568	11.658	11.827	11.94	12.014
6	Pa'jukukang	28.379	28.599	29.017	29.30	29.478
7	Gantarangeke	15.524	15.642	15.865	16.02	16.117
8	Eremerasa	18.213	18.351	18.614	18.80	18.910
Jumlah		172.849	174.176	176.699	178.477	179.505

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Sedangkan dari sisi struktur umur penduduk yang menggambarkan secara umum tentang tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat ketergantungan penduduk. Dikemukakan bahwa Persentase jumlah penduduk umur 15-64 tahun atau disebut dengan usia produktif sebesar 68,37 persen dan persentase jumlah penduduk yang umur 0-14 sebanyak 31,03 persen dan mereka yang berumur 65 tahun ke sebesar 5,07 persen. Mereka yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas disebut dengan usia tidak produktif, karena secara ekonomi kedua kelompok

umur tersebut belum dan tidak produktif lagi. Apabila penduduk yang tergolong usia produktif dibandingkan dengan mereka yang tergolong usia tidak produktif maka diperoleh tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*).

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, untuk periode tahun 2008–2012 sebaran penduduk Kabupaten Bantaeng jika diklasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yang berasal dari Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 :Data Penduduk Kabupaten Bantaeng Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2008 – 2012**

		TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tidak/Belum sekolah	58.563	59.094	61.33	61.868	64.822
2	BelumTamatSD	27.520	27.779	27.84	28.211	28.249
3	SD	47.123	47.493	48.07	48.365	48.033
4	SMP/Sederajat	15.354	15.545	15.76	15.877	16.331
5	SMA/Sederajat	19.297	19.569	19.85	20.021	20.403
6	Diploma	2.724	2.764	2.802	2.831	2.911
7	SI	4.490	4.585	4.616	4.691	4.710
8	SII	190	19	19	19	202
9	SIII	11	8	2	2	14

Sumber:Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

4.1.5. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng

Dari gambaran arahan RPJPD serta identifikasi isu strategis yang ada di Kabupaten Bantaeng, maka visi yang ingin dicapai pada tahun 2018 yang akan datang adalah menjadin pusat ertumbuha ekonomi di bagian selatan Sulawesi Selatan tahun 2018.

Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna bahwa dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan tahun 2018, Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan segala potensi ditargetkan menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa Kabupaten Bantaeng sebagai titik pandang dan pilihan utama para investor untuk menanamkan modalnya, para wisatawan untuk berkunjung ke Bantaeng, para petani yang butuh benih unggul, dan sebagai pusat layanan kesehatan, serta pusat keunggulan lainnya.

Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 ditandai dengan :

- a. Angka Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng peringkat pertama untuk kabupaten yang masuk dalam Assosiasi Kabupaten Selatan Sulawesi Selatan (AKSESS) antara lain Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar, sedangkan untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng masuk peringkat 5 besar. Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan

menurunnya angka kemiskinan hingga dibawah 5%, demikian pula angka pengangguran dibawah 3% dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Bantaeng tertinggi kedua setelah Kota Makassar atau mencapai sebesar Rp. 35 juta lebih.

- b. Terwujudnya kemitraan / interkoneksi dengan Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam, kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan industry, terselenggaranya event-event tingkat provinsi dan tingkat nasional serta kerja sama dibidang pengembangan wirausaha benih

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama priode 2013

- 2018 direncanakan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
3. Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
4. Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu.
5. Penguatan kelembagaan pemerintah

4.1.6. Tujuan dan Sasaran RPJM

Tabel 4.4

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi	Tujuan	Sasaran
Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia	Mewujudkan Manusia yang berkualitas, dan berpengetahuan serta memiliki wawasan yang luas	Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual bagi segenap
		Optimalnya peran majelis taklim desa / kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spiritual
		Optimalnya pelaksanaan program pendidikan
		Meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar
	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi penerapan teknologi informasi (e-learning)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan
		Tersedianya kawasa free WiFi pada kawasan
		Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam
	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk
		Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya
		Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf international dalam mewujudkan
		Terkendalinya pertumbuhan
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan	Mempercepat pewujudan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih Terkemuka dan Model <i>Smart & Green Region</i> di Sulawesi Selatan melalui penguatan sistem inovasi (BPPT)	Meningkatnya produktivitas hasil-hasil pertanian,
		Berkembangnya Usaha
		Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan
		Berkembangnya wirausaha
		Berkurangnya penduduk miskin yang bekerja di
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatnya konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan
		Meningkatnya fungsi hutan non

Misi	Tujuan	Sasaran
		peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar
Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata.	Mengembangkan infrastruktur Pendukung Perdagangan, Industri dan Pariwisata untuk semakin memantapkan <i>The New Bantaeng</i> .	Meningkatnya kapasitas jalan
		Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan
		Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada
		Berkembangnya usaha-usaha berbasis home industry olahan hasil-hasil
		Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan
	Meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk
Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu	Mengoptimalkan peran Lembaga Ekonomi dalam mendorong peningkatan usaha kecil menengah.	Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan
		Meningkatnya kualitas dan peran koperasi /
		Berkembangnya usaha home industry yang
	Meningkatkan peran swasta dalam pembinaan usaha-usaha ekonomi	Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan
		Meningkatnya kontribusi swasta / masyarakat
Penguatan kelembagaan pemerintah.	Mewujudkan pemerintah daerah yang mampu melakukan peran secara efisien dan efektif dengan mempraktikkan prinsip- prinsip good governance secara konsisten	Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam
		Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan
		Terwujudnya pengendalian dan perencanaan
	Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan aparat	Terwujudnya pelayanan public dan pengelolaan keuangan yang transparan,
		Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur
		Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang

	Meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa.	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang professional dalam menyusun
		Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses

4.2 Model Investasi di Kabupaten Bantaeng

4.2.1. Posisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Investasi

Dalam proses kerjasama investasi penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng ini telah melibatkan beberapa pihak yang saling bekerjasama untuk mendukung investasi ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu pihak yang bekerja sama memberikan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan investor, seperti :

1. pemberian data terkait pembangunan ,
2. memfasilitasi pembebasan lahan,
3. pembebasan retribusi.

Hal ini sesuai yang tertera dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing pada pasal 18 dan pasal 26 yang berbunyi :

Pasal 18 (ayat 1 dan 2) “

- 1) **Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal**
- 2) **Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang :**
 - a. **Melakukan peluasan usaha; atau**
 - b. **Melakukan penanaman modal baru**

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bahwa pemerintah wajib memberikan fasilitas kepada investor yang ingin menanamkan modalnya. Fasilitas dan pelayanan yang baik akan memudahkan proses penanaman modal yang dilakukan oleh investor karena hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat investor merasa terjamin oleh pemerintah penerima modal sehingga akan tercipta kepercayaan (trust) dari investor kepada pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya memberikan fasilitas dan pelayanan kepada investor yang masuk ke Kabupaten Bantaeng. sehingga hal tersebut menjadi penilaian tersendiri investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

“Kabupaten Bantaeng dari segi tenaga listrik kita minim, akan tetapi kita punya keunggulan, kalau Kabupaten Bantaeng memberikan kemudahan dan kepastian investasi. Betul-betul pemerintah menjadi mitra yang baik bagi pengusaha, komitmen ini terbaca oleh dunia bahwa ada satu daerah di Indonesia yang bernama Kabupaten Bantaeng yang sejalan dengan dunia usaha. Datanglah dari berbagai negara untuk melihat Bantaeng seperti apa, satu kesyukuran karena kita sudah siap, dari segi

infrastruktur kita sudah siap, kita sudah siapkan akomodasi hotel dan rumah jabatan dipersiapkan untuk mengantisipasi tamu-tamu VIV ,yang ketiga adalah kemitraan yang terbangun antara PLN dan Pemda Bantaeng yang siap membantu pasokan listrik industry, dari segi regulasi kita berikan kemudahan , dari segi lahan pemda membantu kemudahan kepada investor untuk mendapatkan lahan, tapi satu hal pemerintah membackup kepentingan rakyat.” (wawancara Bupati Bantaeng (Prof.Dr.H.Nurdin Abdullah,M.Agr) pada tanggal 21 November 2014 pukul 09.10 wita).

Selain itu, terkait dengan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor secara khusus pelayanan di bidang perizinan , hal telah jelas diatur dalam Undang-undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing pada pasal 26 yang berbunyi :

- 1) **Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal**
- 2) **Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan**
- 3) **Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden**

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (***One Stop Service***) merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Olehnya itu mengacu dari dasar hukum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng memberlakukan system pelayanan terpadu satu pintu yang ditangani langsung oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng dalam hal perizinan kepada investor untuk melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Bantaeng.

Dari Undang-undang dan hasil wawancara diatas menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berperan sebagai fasilitator terhadap investor yang masuk ke Kabupaten Bantaeng dalam rangka memberikan kemudahan kepada investor untuk melakukan aktifitas investasinya di Kabupaten Bantaeng.

Dalam hal pengelolaan investasi ini, dibentuk Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang bakalan berperan aktif dalam operasional investasi. Hal ini telah ditaur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pada pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. memberi jasa.
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
 - c. memupuk pendapatan.
- (2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- (3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- (4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Untuk pembahasan selanjutnya terkait kewenangan Perusahaan Daerah dalam mengelola investasi ini akan dibahas dipembahasan selanjutnya.

4.2.2. Jenis-jenis Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng

Untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Bantaeng melalui investasi industri pengolahan, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng membentuk Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) sebagai pusat kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti lahan dan lokasi yang strategis, fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, air, telepon, jalan, tempat pembuangan limbah, dan lain-lain yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng telah melakukan kerja

sama dengan beberapa investor dari luar untuk mendukung pembangunan kawasan ini. Adapun investor yang sudah masuk di Kabupaten Bantaeng yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5 : Daftar investor Kawasan Industri – Bantaeng Industrial Park

(Per Oktober 2014)

No	Nama Investor	Produksi	Kapasitas Produksi	Nilai Investasi (USD Mio)	Keterangan
Smelter					
1	Macrolink	FeNi	0,24 juta ton/tahun	200	MOU, pembebasan tanah 150 Ha
2	PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT Bakti Bumi Sulawesi)	NPI	0,6 juta ton/tahun	200	MOU, tahap pembangunan
3	PT Titan Mineral Utama	Feni	2,4 Juta ton per/thn	200	MOU, tahap pembangunan
4	PT Cinta Jaya	FeNi	0,02 Juta ton/thn	30	Belum aktif (90% mundur), MOU
5	PT Cheng Feng Mining	FeNi	0,25 juta ton/thn	200	Belum aktif, MOU
6	PT NingXia Anhydrous Port Logistics (PT.Zhongning	FeNi	0,075 juta ton/thn	100	MOU, Pembebasan lahan 50 Ha

	Mining Metallurgy				
7	PT Yinyi Indonesia Mining Investment	FeNi	0,5 juta ton/thn	200	Belum aktif, MOU
8	PT Mex Internasional	NPI 12%	0,12 juta ton/tahun	300	Belum aktif,MOU
		Pig Iron	2 juta ton/thn		
		Iron Ore	4 juta ton/thn		
9	PT Bantaeng Industrial Pratama	NPI- target 2x33MW furnaces dengan teknologi sintering	0,12 juta ton/thn	200	Belum aktif,MOU
10	Xin Hai Tecnology	FeNi	0,48 juta ton/thn	500	Belum aktif,MOU
11	PT Mitra Tambang selaras	FeNi	0,02 juta ton/thn	50	MOU, Pembebasan lahan 104 Ha
POWER PLANT					
12	PT Bantaeng Zigma Energy-	PLTU	600 MW	500	MOU, Pembebasan

	BTN power Shd-CMEC-Doozan Energy				lahan 15 Oktober 2014 Ground Breaking
13	Xinhai Technology	PLTU	300 MW	300	Belum aktif,MOU
14	PT Bissappu Energi baru	PLTMH	7-9 MW	15	MOU, Pembebasan tanah
15	PT Mega Power Makmur	PLTU	4,2 MW	10	MOU, Proses pembangunan
16	PT Bumi Bantaeng Industri (PT BIP Power – bekerjasama dengan GCL Power dan Shenhua Guohua Power)	PLTU	300 MW GCL 600 MW Gouhua	900	Belum aktif,MOU
17	Sparling Capital	PLTU	300 MW	200	Belum aktif
PORT					
18	PT China Harbour Indonesia	Port Road Public Service	86 juta ton/thn 90 km road	1000	Izin selesai, MOU
19	PT Pelabuhan Bantaeng Samudera	Port	26 Ha Stock File	280	Tahap peninjauan kerjasama
WATER TREATMENT					

20	Doosan Heavy Industris & Construction Co,Ltd	Water Treatment		500	a.Proses FS b. Kontrak dengan Investor
LIME STONE PLANT					
21	PT bangun Arta Group	Kapur Tohor Kapur Bakar (CaO) Kapur Mentah (CaCO ₃)	150 ton/hari 300 ton/hari	Mesin perlatan 7 juta USDollar 500 USDollar	Belum aktif,MOU,tela h melakukan survey potensi bahan baku ke daerah di Sulawesi Selatan
ORE NICKLE SUPPLIER					
22	PT. BSM (Bumi Sultra Mandiri)	Ore Nickle	Memiliki 3 izin IUP	10	MOU
23	PT. Cahaya Exindo Pratama	Ore Nickle	Memiliki 15 izizn IUP	50	MOU
24	PT.Laba-laba Nusantara Mineral	Ore Nickle		5	MOU
25	PT.Azwar Makmur Perkasa	Ore Nickle		5	MOU
BEACHING PLANT					
26	PT. Prima karya manunggal	Semen campuran		15	MOU, telah melakukan pembangunan

27	PT.Semen Bosowa	Semen campuran		10	MOU
SOLAR SUPPLIER					
28	PT.Bantaeng Mujur Perkasa	Solar		5	MOU
29	PT.PAN (Petronas)	Solar		5	MOU
REFINERY					
30	PT.Multi Kilang Pratama Doha			25	MOU, pembebasan lahan

Sumber: Data Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Bantaeng.

Dari data di atas menunjukkan bahwa semua investasi yang ada di Kabupaten Bantaeng itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Semua investasi yang dicanangkan untuk mendukung percepatan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Hal ini senada dengan wawancara bersama Bupati Bantaeng yang isinya :

“Untuk menuju kawasan industri Bantaeng, kita harus memenuhi beberapa persyaratan seperti: ketersediaan listrik,ketersedian air,infrastruktur dan pelayanan public, dari segi listrik kita masih sedikit,tapi Alhamdulillah kita siap diBackup oleh PLN untuk menujung ketersediaan listrik industry”. (wawancara Bupati Bantaeng pada tanggal 21 November 2014 pukul 09.10 wita).

Keterkaitan investasi ini bisa tergambarkan dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa untuk menuju Bantaeng Industrial Park, Pemerintah melakukakn kerja sama dengan beberapa investor seperti :

1. investasi power plant untuk ketersediaan listrik (PT.Bantaeng Zigma Energy,Xinhai Technology,PT Bissapu Energy Biru, PT.Mega Power Makmur,PT Bumi Bnataeng Industri,dan Sparling Capital)
2. solar supplier untuk suplay bahan bakar (PT.Bantaeng Mujur Perkasa dan PT. PAN (Petronas)
3. investasi port untuk pelabuhan sebagai sarana transportasi (PT.China Harbour Indonesia dan PT.Pelabuhan Bantaeng Samudra).

4.2.3. Pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng

Kecamatan Pa'jukukang merupakan daerah kawasan khusus pengembangan industry di Kabupaten Bantaeng,hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 pada pasal 39 yang berbunyi :

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:**
 - a. Kawasan peruntukan industry besar;
 - b. Kawasan peruntukan industry sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industry rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang.**
- (3) Kawasan peruntukan industry sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan industry pengolahan ditetapkan di Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu.**
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, dan PPK.**

Dalam pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini, pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT.Bintang Selatan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam bentuk konsorsium sebagai pengelola Kawasan Industri Bantaeng. Perusahaan konsorsium ini terdiri dari empat perusahaan yang saling bekerjasama membentuk satu perusahaan baru sebagai pengelola kawasan ini. Hal ini ditegaskan oleh Direktur PT.Bintang Selatan dalam wawancara dengan peneliti yang berbunyi :

Perusda ini sekarang menjadi badan pengelola kawasan dia merupakan konsorsium dari empat perusahaan yang terdiri dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda. Dari empat perusahaan ini membentuk perusahaan PT Bantaeng Industri Persada (BIP) sebagai pengolala kawasan..dari konsorsium itu Perusda mendapatkan 10 % dari nilai investasi dari 113 triliun total investasi.(wawancara dengan Direktur Perusda PT.Bintang Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 pukul 11.00 wita).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini di kelola oleh PT.Bantaeng Industri Persada (BIP) yang berasal dari konsorsium empat perusahaan yaitu dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda (PT.Bintang Selatan) sebagai perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam kerjasama investasi kawasan industry ini. Selain itu, dalam hal pengawasan Kawasan Industri Bantaeng ini diawasi oleh Dewan KIBA yang dibentuk oleh

Bupati Kabupaten Bantaeng untuk mengawasi dan mengontrol segala proses kegiatan atau kerja-kerja yang dilakukan oleh kawasan industry ini.

4.2.4. Model Kerja Sama Investasi di Kabupaten Bantaeng

Untuk mengidentifikasi bentuk kerjasama investasi di Kabupaten Bantaeng dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu : bentuk kerjasama kerjasama, bentuk badan hukum dan pembagian saham.

a. Bentuk kerjasama

Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, baik perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri. Hal ini ditegaskan oleh Direktur PT.Bintang Selatan (Perusda Kabupaten Bantaeng) dalam wawancara dengan peneliti yang berbunyi :

“Perusda ini sekarang menjadi badan pengelola kawasan dia merupakan konsorsium dari empat perusahaan yang terdiri dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda. .(wawancara dengan Direktur Perusda PT.Bintang Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 pukul 11.00 wita).

Dari data wawancara diatas mengisyaratkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini PT.Bintang Selatan(Perusda) melakukan kerjasama patungan dalam konsorsium dari empat perusahaan yang menjadi pengelola Kawasan Industri Bantaeng.

Di dalam praktek kerjasama penanaman modal asing diberbagai negara, perusahaan patungan (Joint Venture) menjadi sangat populer untuk digunakan. Istilah Joint Venture dalam kesahian kehidupan masyarakat selalu dipergunakan untuk menunjukkan sebuah kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing didalamnya. Dengan bahasa lain Joint Venture sering diistilahkan dengan sebutan "patungan". Sedangkan di kalangan Pemerintah istilah Joint Venture adalah suatu istilah yang diberikan secara khusus untuk suatu bentuk kerjasama tertentu antara pemilik modal nasional (swasta atau Perusahaan Negara) dan pemilik modal asing.

b. Bentuk Badan Hukum

Dalam perusahaan patungan (konsorsium) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui PT.Bintang Selatan (Perusda),ada empat perusahaan konsorsium yang melakukan kerjasama dengan membentuk perusahaan baru (badan hukum) sebagai pengelola Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Hal ini dijelaskan oleh Direktur PT.Bintang Selatang (Perusda Kabupaten “Bantaeng) dalam wawancaranya dengan peneliti yang berbunyi :

“Perusda ini sekarang menjadi badan pengelola kawasan dia merupakan konsorsium dari empat perusahaan yang terdiri dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda. Dari empat perusahaan ini membentuk perusahaan PT Bantaeng Industri Persada (BIP) sebagai pengolala kawasan. (wawancara dengan Direktur Perusda PT.Bintang Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 pukul 11.00 wita).

Menurut Ismail Suny ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu joint venture, joint enterprise dan kontrak karya. Dalam hal joint venture para pihak tidak membentuk badan hukum yang baru, akan tetapi kerjasama semata-mata bersifat kontraktuil, sedangkan dalam joint enterprise terjadi penggabungan modal asing dengan modal nasional ke dalam satu badan hukum Indonesia dan dalam kontrak kerja pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum (nasional) Indonesia yang lain.

A. Joint Venture

Joint venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractual). Misalnya bentuk kerjasama antara Van Sickle Associates Inc.,(suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware, Amerika Serikat) dengan PT Kalimantan Plywood Factory (suatu badan hukum Indonesia) untuk bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama ini juga biasa disebut dengan “Contract of Cooperation ” yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA.

B. Join Enterprise

Joint enterprise merupakan suatu kerjasama kerja sama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi :

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. **kepastian hukum;**
- b. **keterbukaan;**
- c. **akuntabilitas;**
- d. **perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;**
- e. **kebersamaan;**
- F **efisiensi berkeadilan;**
- g. **berkelanjutan;**
- h. **berwawasan lingkungan;**
- i. **kemandirian; dan**
- j. **keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.**

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. **meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;**
- b. **menciptakan lapangan kerja;**
- c. **meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;**
- d. **meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;**
- e. **meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;**

- f. **mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;**
- g. **mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan**
- h. **meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Joint enterprise lazimnya berupa Perseroan Terbatas (PT), dengan modal berupa saham yang berasal dari modal dalam nilai rupiah dan dalam valuta asing. antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA..

C. Kontrak Karya

Pengertian kontrak karya (contract of work) sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja sama antara badan hukum milik negara (BUMN) seperti; Kontrak karya antara PN. Pertamina dengan PT. Caltex International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib

dalam bentuk perseroan terbatas. Secara lengkap, bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal:

“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”²⁹

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi:

1. bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perseroan terbatas (PT);
2. didasarkan pada hukum Indonesia;
3. berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing atau dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.

c. Pembagian Saham

Dalam perusahaan konsorsium (PT.Bantaeng Industri Persada) sebagai pengelola Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), PT.Bintang Selatan sebagai perusda yang merepresentasikan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ini mendapatkan kepemilikan saham di dalam PT.Bantaeng Indsutri Persda sebanyak 10 % dari total 113 triliun investasi yang dicanangkan. Hal ini

ditegaskan oleh Direkrur PT.Bintang Selatan (Perusda) setelah diwawancarai oleh penulis yang berbunyi :

Perusda ini sekarang menjadi badan pengelola kawasan dia merupakan konsorsium dari empat perusahaan yang terdiri dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda. Dari empat perusahaan ini membentuk perusahaan PT Bantaeng Industri Persada (BIP) sebagai pengelola kawasan..dari konsorsium itu Perusda mendapatkan 10 % dari nilai investasi dari 113 triliun total investasi.(wawancara dengan Direktur Perusda PT.Bintang Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 pukul 11.00 wita).

Dalam ventura bersama terdapat dua komposisi kepemilikan saham perusahaan yaitu ventura bersama 50-50 dan ventura bersama dengan komposisi saham yang berbeda. Untuk konteks yang sedang berlangsung di Kabupaten Bantaeng, dalam hal kepemilikan saham ini komposisinya berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya proses identifikasi dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini :

Tabel 4.6 : Bagan Identifikasi Model Kerja Sama Investasi

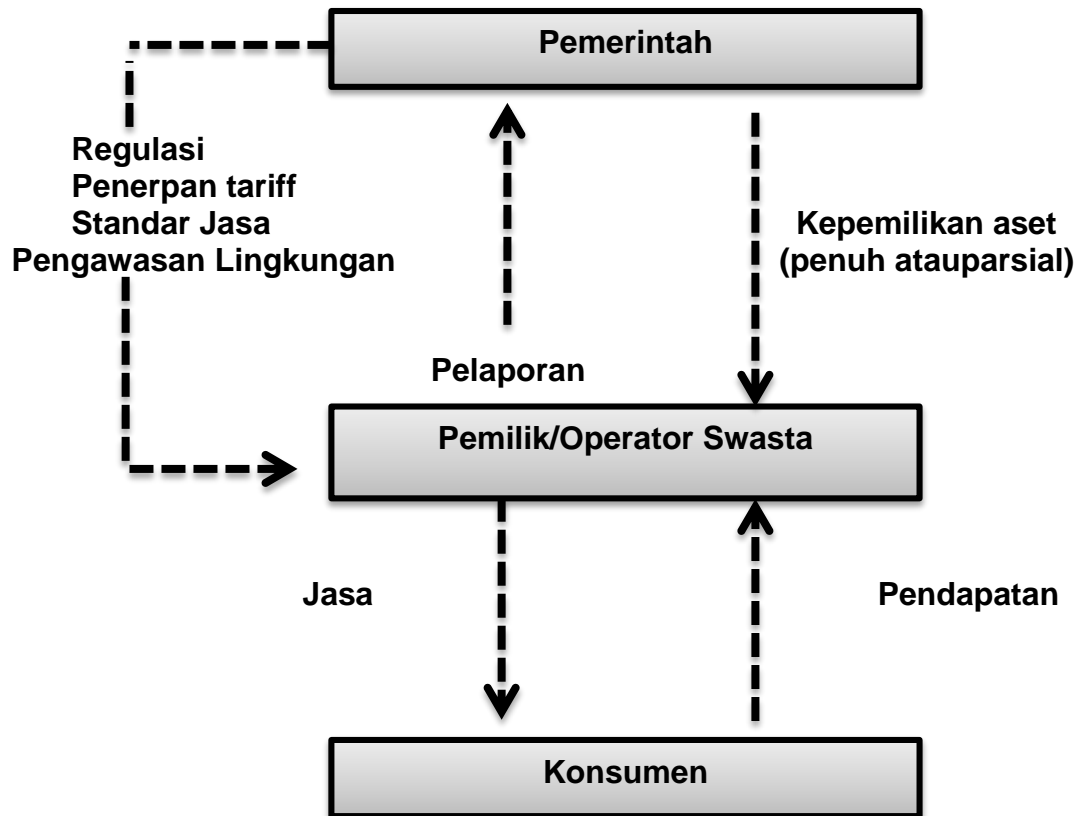
Pendekatan Identifikasi	Kondisi di kabupaten Bantaeng
Perusahaan Patungan	Peruda tergabung dalam konsorsium pengelola kawasan industry dari 4 perusahaan
Membentuk badan hukum baru	PT.Bantaeng Industri Persada dibentuk dari 4 perusahaan

	konsorsium (PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax DaChina dan Perusda (PT.Bintang Selatan)
--	--

Mengacu dari tiga pendekatan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa model kerjasama investasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah kerjasama investasi joint enterprise. Joint enterprise yang menekankan suatu kerjasama kerja sama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru, namun pada dasarnya joint enterprise merupakan turunan dari bentuk kerjasama joint venture (perusahaan patungan).

Dalam ventura bersama antara sector public (pemerintah) dan operator swasta, struktur ventura bersama sering kali diiringi juga dengan kontrak tambahan (misalnya,konsensi atau perjanjian kinerja) yang memerinci harapan dari masing-masing pihak. Berikut ini contoh struktur perjanjian ventura bersama swasta-pemerintah.

Gambar 4.2 : Bagan Siklus Join Venture



Sumber: ventura bersama (joint venture): PSAK 12 (Revisi 2009)

4.3. Prospek Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng

Dalam pembahasan ini akan dianalisis mengenai prospek penanaman modal asing di terhadap sector ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng. Namun sebelum dianalisis tentang hal tersebut lebih dahulu akan dikemukakan hasil penelitian mengenai bagaimana kondisi penanaman modal asing tersebut untuk kemudian menemukan kondisi-kondisi yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng sebagai dasar untuk melakukan analisis prospek

4.3.1. KIBA sebagai Manifestasi dari Penanaman Modal Asing dan Hubungannya dengan Ketenakerjaan

Di dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng, ada tiga pilar pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Salah satu pilar yang dicanangkan yaitu menjadi pusat pengembangan industri di kawasan selatan Sulawesi Selatan. Olehnya itu, di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng menempatkan Kecamatan Pajukukang sebagai daerah kawasan industri di Kabupaten Bantaeng. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Ekososbud Bappeda Kabupaten Bantaeng dalam wawacranya dengan penulis yang berbunyi :

“dalam rencana tata ruang wilayah Kecamatan Pajukukang sebagai kawasan industri Bantaeng yang dikenal dengan BIPBantaeng Industrial Park, berkat jaringan bupati dan pelayan yang diberikan (kemudahan perizinan), layanan kesehatan, infrastruktur dan kultur masyarakat bantaeng yang welcom menjadi daya tarik investor untuk masuk ke Bantaeng, Bantaeng bukan penghasil tambang, sebagai mata rantai perekonomian di Bantaeng dari hasil tambah dari daerah lain, maka Bantaeng akan menjadi daerah pengolah hasil tambang dari daerah lain.” (wawancara dengan Kabid Ekososbud Bappeda Bantaeng pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 11.30 Wita)

Dari wawancara diatas dapat di lihat bahwa titik tolak penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng adalah kerjasama investasi industri pengolahan nikel (smelter). Namun seperti yang dapat di lihat dalam hasil wawancara bahwa bantaeng bukan merupakan produsen hasil tambang

melainkan pengolah hasil tambang, dalam hal ini hasil tambang berupa nikel. Mengenai hal ini akan dibahas kemudian dalam pembahasan selanjutnya.

Industri pengolahan nikel (smelter) ini menjadi titik tolak masuknya beberapa investasi pendukung di Kabupaten Bantaeng. Sehingga untuk mengakomodir semua investasi di Kabupaten Bantaeng, maka dibangunlah sebuah kawasan khusus industri.

Olehnya itu, dalam rangka percepatan pembangunan kawasan industri, maka pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng melakukan kerja sama investasi dengan beberapa perusahaan baik perusahaan nasional dan perusahaan asing. Di dalam kerja sama ini pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng melalui Perusahaan daerah (Perusda) dengan model joint venture yang membentuk perusahaan konsorsium bersama tiga perusahaan lainnya sebagai pengelola kawasan Industri Bantaeng. Hal ini dipertegas dalam wawancara penulis dengan Direktur Perusda Kabupaten Bantaeng yang isinya :

“Perusda ini sekarang menjadi badan pengelola kawasan dia merupakan konsorsium dari empat perusahaan yang terdiri dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda. Dari empat perusahaan ini membentuk perusahaan PT Bantaeng Industri Persada (BIP) sebagai pengelola kawasan..dari konsorsium itu Perusda mendapatkan 10 % dari nilai investasi dari 113 triliun total investasi.(wawancara dengan Direktur Perusda PT.Bintang Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 pukul 11.00 wita).

Berdasarkan wawancara di atas, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Perusda ini menjadi pengelola Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) bersama dengan tiga perusahaan konsorsium lainnya.

Dengan adanya Kawasan Industri Bantaeng ini tentunya akan membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dengan meningkatkan PAD Kabupaten Bantaeng yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Bantaeng pada umumnya.

Terkhusus terhadap sector ketengakerjaan, peningkatan PAD berdampak pada berkembangnya sector ekonomi baru dari pengalokasian anggaran pada sector-sektor produksi lainnya sehingga meningkatkan peluang kerja dan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bantaeng . selain itu hal yang menjadi kepastian dari adanya kawasan industry ini adalah terjadinya permintaan terhadap tenaga kerja dengan kualifikasi ketenagakerjaan yang berbeda dari sector lainnya sehingga otomatis akan ada pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bantaeng yang sejalan dengan pengurangan angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan tujuan penanaman modal asing itu sendiri yang telah tercantum di dalam Undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing pada pasal 3 ayat 2 poin b yang menerangkan bawa tujuan penanaman modal asing adalah menciptakan lapangan kerja. Kondisi ini di di perkuat oleh data tentang estimasi

kesempatan kerja yang bakalan terserap di Kawasan Industri Bantaeng, di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 : Penciptaan Kesempatan Kerja Langsung dan Tidak Langsung Melalui BIP

(Dasar Asumsi 200 Kepala/Production Line dalam 3 Shitts)

N o	Period	Phase I:2015-2020 (Head)			Phase II: 2020-2025 (Head)			Grand
		Stage 1	Stage 2	Phase I	Stage 3	Stage 4	Phase II	Total
		2015- 2017	2018- 2020	2015- 2020	2020- 2022	2023- 2025	2020- 2025	2015- 2025
1	Huadi	200	800	1.000	300	300	600	1.600
2	MEX	400	400	800	400	400	800	1.600
3	Titan	200	200	400	200	200	400	800
4	Macrolink	400	400	800	400	400	800	1.600
5	Ningxia	200	200	400	200	200	400	800
6	Tian You	100	900	1000	400	400	800	1.800
7	Xinhai	400	400	800	400	400	800	1.600
8	Other Smelters	100	300	400	200	200	400	800
Sub total Smelter		2.000	3.600	5.600	2.500	2.500	5.000	10.600
9	Power Station	400	720	1.120	500	500	1.000	2.120
10	Supportin	200	360	560	250	250	500	1.060

	g Industry + services							
Total Direct Labour		2.600	4.680	7.280	3.250	3.250	6.500	13.780
Total Direct + Indirect labour		10.400	18.720	29.120	13.000	13.000	26.000	55.120

Sumber: dinas social dan (*naskah Pengembangan Soft Infrastructure untuk Mengantisipasi Pembangunan Bantaeng Industrial Park*)

Dengan perencanaan yang digambarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kawasan Industri Bantaeng ini nantinya bakalan menyerap kesempatan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu data kesempatan kerja ini nantinya bakalan saling mempengaruhi dengan dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng.

Dalam hal dinamika ketenakerjaan, maka tentu saja bakalan erat kaitannya dengan angkatan kerja. Angkatan Kerja (labour force) merupakan penduduk usia 15 tahun keatas (tenaga kerja/man power) dan tidak termasuk di dalamnya penduduk yang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga dan lainnya. Angkatan kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (employed) dan mencari pekerjaan/menganggur (unemployed). Berikut di bawah ini akan digambarkan tabel angkatan kerja Kabupaten Bantaeng.

Tabel 4.8 : Jumlah Angkatan Kerja,Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2013

Kelompok Umur	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
15-19	8.006	5.627	13.633	8.006	8.034	16.040	100,0	70,04	85,00
20-24	8.214	5.836	14.050	8.214	8.367	16.581	100,0	69,75	84,74
25-29	9.208	6.719	15.927	9.208	9.715	18.923	100,0	69,16	84,17
30-34	9.288	6.691	15.979	9.288	9.640	18.928	100,0	69,41	84,42
35-39	7.846	5.790	13.636	7.846	8.402	16.248	100,0	68,91	83,92
40-44	7.437	5.354	12.791	7.437	7.702	15.139	100,0	69,51	84,49
45-49	5.751	4.398	10.149	5.751	6.453	12.204	100,0	68,15	83,16
50-54	4.708	3.362	8.070	4.708	4.836	9.544	100,0	69,52	84,56
55-59	3.223	2.433	5.656	3.223	3.559	6.782	100,0	68,36	83,40
60-64	2.623	1.845	4.465	2.623	2.634	5.257	100,0	70,05	84,99
Jumlah	66.304	48.055	114.359	66.304	69.342	135.646	100,0	69,29	84,29

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng Tahun 2013,diolah Tahun 2014

Dari tabel di atas, Nampak bahwa jumlah angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 15.979 orang, diikuti kelompok umur 25-29 tahun sebesar 15.927 orang dan terendah pada kelompok umur 60-64 tahun yaitu sebesar 4.468 orang. Tabel di atas menunjukkan bahwa 84,29 persen dari angkatan kerja di Kabupaten Bantaeng telah berpartisipasi dalam pasar kerja. Nampak pula bahwa

partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki lebih tinggi (100,00%) dari partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan (69,29%).

**Tabel 4.9 : Jumlah Pencari Pekerjaan dan Angka Pengangguran
(Unemployment Rate-UER) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013**

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah Mencari Pekerjaan	% Pengangguran Terbuka	Jumlah Mencari Pekerjaan	% Pengangguran Terbuka	Jumlah Mencari Pekerjaan	% Pengangguran Terbuka
15-19	3.336	41,67	3.347	59,48	6.683	49,02
20-24	3.421	41,65	3.486	59,73	6.907	49,16
25-29	3.835	41,65	4.046	60,22	7.881	49,48
30-34	3.868	41,65	4.014	59,99	7.882	49,33
35-39	3.267	41,64	3.500	60,45	6.767	49,63
40-44	3.098	41,66	3.209	59,94	6.307	49,31
45-49	2.393	41,61	2.688	61,12	5.081	50,06
50-54	1.960	41,63	2.012	59,85	3.972	49,22
55-59	1.341	41,61	1.481	60,87	2.822	49,89
60-64	1.093	41,67	1.097	59,46	2.190	49,02
Jumlah	27.612	41,65	28.880	60,10	56.492	49,40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Tahun 2013,diolah Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan angkatan kerja yang menganggur menurut pengelompokan umur lima tahunan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengangguran tertinggi berada di kelompok umur 55-59 tahun yakni 49,89 persen dan 35-39 tahun yakni 49,63 persen. Pengangguran pada kelompok umur 15-24 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan sehingga terpaksa mencari pekerjaan pada umur sekolah.

Angka pengangguran terendah berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan 60-64 tahun yakni 49,02 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka pengangguran perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun lebih tinggi (59,48%) dibandingkan laki-laki (41,67%). Penduduk umur 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk di bangku pendidikan, belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan pendidikan dan keterampilan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal keterampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh

kejahatan. Indikator ini sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan

Selain jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran, tingkat pendidikan angkatan kerja menjadi salah satu aspek terpenting yang mempengaruhi dalam hal penyerapan tenaga kerja di dalam Kawasan Industri Bantaeng nantinya. Tingkat pendidikan akan selalu ekuivalen dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Berikut di bawah ini gambaran tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng.

Tabel 4.10 : Distribusi Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng 2013

Tingkat Pendidikan	Angkatan Kerja					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	%	n	%	N	%
Tidak/Belum Sekolah	27.80	35,90	13.36	36,21	41.169	36,00
	5		4			
Belum Tamat SD/Sederajat	11.99	15,48	5.507	14,92	17.497	15,30
	0					
Tamat SD/Sederajat	18.96	24,50	9.256	25,08	28.232	24,69
	7					

SLTP/Sederajat	6.614	8,54	3.281	8,89	9.895	8,65
SLTA/Sederajat	9.194	11,87	3.720	10,08	12.914	11,29
Diploma I/II	434	0,56	509	1,38	943	0,83
Akademi/Dipl.III/Sar mud	294	0,38	251	0,86	545	0,48
Dipl.IV/Strata I	1.991	2,57	993	2,69	2.984	2,61
Strata II	139	0,18	22	0,06	161	0,14
Strata III	15	0,02	4	0,01	19	0,02
Jumlah	77.45	100,0	36.90	100,0	114.35	100,0
	2	0	7	0	9	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bantaeng Tahun 2013,diolah Tahun 2014

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dari tabel di atas Nampak bahwa lebih dari seperempat angkatan kerja kabupaten bantaeng Tidak/Belum Sekolah (36,00%) kemudian Tamat SD (24,69%) dan (15,30%) Belum tamat SD/Sederajat. Terbukanya kesempatan pendidikan, telah mendorong penduduk baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi ,Berbagai Fasilitas pendidikan dari pendidikan dasar.menengah dan tinggi tersedia, dan dimanfaatkan oleh penduduk Kabupaten Bantaeng maupun kabupaten-kabupaten disekitarnya termasuk mereka yang dari jauh.Lebih

memprihatinkan adalah 4,08 persen yang mencari pekerjaan adalah lulusan perguruan tinggi. Dengan kualitas pendidikan yang rendah tersebut, perlu adanya perhatian pemerintah berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dan perlunya memberikan keterampilan agar mereka mampu bersaing di pasar kerja.

Persentase angkatan kerja laki-laki yang tidak/Belum sekolah (35,90%) lebih rendah dibandingkan perempuan (36,21%), demikian pula pada jenjang Tamat SD/Sederajat angkatan Kerja laki-laki (24,50%) lebih rendah dibandingkan perempuan (25,08%). Akan tetapi pada jenjang Belum tamat SD/Sederajat, persentase angkatan kerja perempuan (14,92%) lebih rendah dibandingkan laki-laki (15,48%). Sedangkan untuk pendidikan yang lebih tinggi, persentase angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (kecuali SLTA/Sederajat, S2 dan S3). Kondisi ini mirip dengan kondisi nasional, bahwa angkatan kerja pada umumnya Tidak/Belum sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya mempermudah kesempatan memperoleh pendidikan utamanya pendidikan kejuruan yang mempersiapkan lulusannya agar langsung terjun ke pasar kerja.

Olehnya itu, untuk merespon pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dengan asumsi bakalan menyerap banyak kesempatan kerja bagi masyarakat (angkatan kerja) Kabupaten Bantaeng, maka pemerintah Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan Kementrian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia sedang membangun Balai Latihan Kerja untuk mempersiapkan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng agar mampu bersaing di dalam pasar kerja, dalam hal ini di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng dalam wawancaranya dengan penulis yang berbunyi :

“Dinas social, tenaga kerja dan transmigrasi sementara membuat regulasi ram perda tentang pelatihan produktifitas kerja, kehadiran ram perda ini seringing dengan kehadiran BLK Kabupaten Bantaeng di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang.. diatas areal 15 hektar yang dibangun sejak tahun 2013, dan diharapkan beroperasi November 2015 mulai beroperasi” (wawancara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 11.30 Wita).

4.3.2. Analisis Prospek Penanaman Modal Asing terhadap Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng

Dalam pembahasan akan dibahas tentang prospek penanaman modal asing terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng. Sebelum itu seperti yang di bahas pada bab terdahulu bahwa analisis prospek merupakan model analisis yang memproyeksi kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan. Maka terlebih dahulu penulis akan menyajikan hal-hal yang merupakan kelebihan dan kekurangannya yang mengacu pada hasil penelitian untuk kemudian dijadikan bahan dalam melakukan analisis prospektif.

Selanjutnya untuk memudahkan pembahasan penulis kemudian memilah dan mengklasifikasi data menjadi beberapa dimensi pembahasan untuk di bahas secara terpisah namun berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa yang menjadi kekurangan dan kelebihan... adalah sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.11 : kelebihan dan kekurangan Kawasan Industri Bantaeng

Kelebihan	Kekurangan
Membuka kesempatan kerja untuk masyarakat Bantaeng	Tingkat Pendidikan masyarakat Bantaeng rendah
Tumbuhnya sector ekonomi baru di sekitar KIBA	Bantaeng bukan penghasil bahan baku
Adanya dana alokasi untuk mengembangkan APBD	
Model <i>joint ventrure</i> memungkinkan pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk turut andil dalam pengambilan kebijakan di perusahaan pengelola KIBA	

Selanjutnya berikut analisis penulis terhadap prospek PMA terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng

- a. Kelebihan Penanaman modal asing terhadap ketenagakerjaan

1) Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Bantaeng

Penanaman modal asing dilakukan dengan menjalankan usaha di suatu negara. Berdirinya sebuah usaha membutuhkan berbagai faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang diperlukan adalah tenaga kerja. Dengan demikian penanaman modal dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam siklus ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Bila masyarakat memperoleh pekerjaan, berarti terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya dengan pendapatan yang diterima masyarakat dapat mencukupi kebutuhan. Makin banyak kebutuhan masyarakat yang terpenuhi, berarti makin sejahtera kehidupan masyarakat tersebut.

Kehadiran Kawasan Industri Bantaeng (Kiba) sebagai manifestasi dari penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng tentu saja menjadi angin segar bagi sector ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Hal ini dimungkinkan karena di dalam Kawasan Industri Bantaeng itu sendiri terdapat investasi utama berupa investasi smelter pengolahan nikel dan beberapa investasi pendukung untuk menopang KIBA. Dari data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng menggambarkan bahwa total kesempatan kerja yang dibutuhkan dalam Kawasan Industri Bantaeng ini sebanyak 55.120 tenaga kerja yang bakalan diserap nantinya. Dari total

tenaga kerja yang dibutuhkan ini bakalan menjadi sebuah solusi untuk mengentaskan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 56.492 orang dari 114.359 angkatan kerja Kabupaten Bantaeng (sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng). Dengan estimasi kesempatan kerja yang bakalan disereap kemudian diperhadapkan dengan angka pengangguran yang ada, maka kehadiran Kawasan Industri Bantaeng ini sangat berdampak positif dalam mengentaskan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bantaeng.

- 2) Tumbuhnya Sektor Ekonomi Baru di sekitar Kawasan Industri Bantaeng
Adanya penentuan kawasan industri menyebabkan pemusatan pembangunan pada wilayah tertentu, yang secara langsung akan mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan alam sekitarnya. Hal ini diikuti oleh perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan ini membawa akibat lebih lanjut pada perubahannya pola perekonomian yang ada, yaitu dari sektor pertanian ke sektor non pertanian atau industri. Perubahan pola perekonomian antara lain tampak dari peluang beusaha, pola penggunaan lahan, perubahan mata pencaharian dan sarana serta prasarana perekonomian yang ada.

Kehadiran Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pajjukukang akan membawa dampak yang signifikan terhadap roda perekonomian yang ada di daerah Pajjukukang yang menjadi areal pembangunan

kawasan industri tersebut. Kawasan Industri Bantaeng bakalan menjadi sentrum kegiatan perekonomian di Kecamatan Pajjukukang karena areal kawasan tersebut membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja Kawasan Industri Bantaeng. Hal ini juga ditegaskan oleh Kabid Ekososbud Bappeda Kabupaten Bantaeng dalam kutipan wawancaranya dengan penulis yang berbunyi :

“Kawasan Industri Bantaeng ini juga akan membawa dampak positif bagi masyarakat di daerah sekitar kawasan, dalam hal ini masyarakat Pajjukukang karena nantinya pasti bakalan membuka peluang usaha bagi masyarakat seperti, warung makanan, usaha laundry, penginapan dan lain-lain (wawancara dengan Kabid Ekososbud Bappeda Kabupaten Bantaeng pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 11.30 Wita)

Berdasarkan wawancara di atas, menegaskan bahwa Kawasan Industri Bantaeng bakalan membuka peluang usaha bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar areal Kawasan Industri Bantaeng.

3) Adanya dana alokasi untuk mengembangkan APBD

Investasi merupakan kunci utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu negara maka semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Sama halnya yang kasus investasi yang ada di Kabupaten Bantaeng melalui Kawasan Industri Bantaeng. Dengan adanya mega proyek berupa kawasan industri dengan total investasi sekitar 113 triliun

maka tentu saja akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bantaeng. Hal ini dimungkinkan karena dari total investasi tersebut Kabupaten Bantaeng melalui Perusda berhak terhadap 10% kepemilikan saham sebagai salah satu pengelola Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Dengan kepemilikan saham tersebut, penulis berasumsi bahwa keadaan fiscal Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya hanya memiliki 600 M total APBD ini akan mendapatkan keuntungan sekitar 11,3 triliun yang nantinya akan terserap ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Bantaeng. Olehnya itu, dengan kondisi ini akan membuat kapasitas fiscal Kabupaten Bantaeng menjadi mapan sehingga Kabupaten Bantaeng akan menjadi surplus anggaran. Hal ini akan membuka peluang bagi sector-sektor potensial lainnya yang ada di Kabupaten Bantaeng untuk mendapatkan suntikan anggaran sehingga dampak peningkatan PAD ini juga akan terasa terhadap pembangunan infrastruktur lainnya yang ada di Kabupaten Bantaeng seperti: pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang lainnya yang bakalan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng.

- 4) Model *joint venture* memungkinkan pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk turut andil dalam pengambilan kebijakan di perusahaan pengelola KIBA

Joint venture merupakan salah satu bentuk kerjasama investasi dengan ciri-ciri berupa perusahaan patungan antara persusahaan negara dan

perusahaan swasta sesuai yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam kasus kerja sama investasi di Kabupaten Bantaeng yang menunjukkan bahwa joint venture merupakan model kerja sama yang dipakai untuk mengelola Kawasan Industri Bantaeng bersama dengan beberapa perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pengelola Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Model joint venture ini memberikan andil kepada pemerintah kabupaten Bantaeng untuk mengontrol dan mengambil posisi yang strategis dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan pengelola Kawasan Industri Bantaeng. Hal ini ditandai dengan kepemilikan saham 10% Perusda di dalam konsorsium tersebut. Hal ini akan mengurangi dominasi perusahaan asing dalam beraktivitas investasi di Kabupaten Bantaeng. Sehingga Kabupaten Bantaeng dapat meminimalisir berupa control yang kuat terhadap proses investasi dalam hal ini pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng.

b. Kelemahan penanaman modal asing terhadap ketengakerjaan di Kabupaten Bantaeng

1. Tingkat Pendidikan masyarakat Bantaeng rendah

Pendidikan merupakan hal terpenting yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditegaskan oleh *Adam Smith* dalam teorinya yang mengemukakan bahwa perubahan dicapai dengan secara langsung memberikan pengalaman kerja. Di sini bukan "manipulasi"

mental yang dipakai sebagai instrumen pengubah, tetapi pengalaman kerja yang dialami secara nyata oleh si buruh yang mengubah sikap dan tingkah lakunya. Tetapi menang Inkeles dan Smith juga menyatakan bahwa pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk membentuk manusia modern. Industri sebagai sector produksi modern menuntut spealisasi manusia terhadap penggunaan teknologi sebagai cerminan kemajuan zaman. Tingkat pendidikan mengambil peran penting terhadap spesialisasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam industry. Dalam kasus Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini nantinya bakalan menyerap banyak tenaga kerja yang tentu saja memiliki spesialisasi tersendiri berdasarkan kebutuhan industry. Olehnya itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Kawasan Industri Bantaeng nantinya maka tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Namun berdasarkan data yang ada, tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng ini masih dibawah rata-rata yaitu seperempat angkatan kerja Kabupaten Bantaeng Tidak/Belum Sekolah (36,00%) kemudian Tamat SD (24,69%) dan (15,30%). Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng masih di bawah rata-rata. Dengan kondisi ini tersebut besar kemungkinan kalau spesialisasi yang memungkinkan untuk angkatan kerja yang diserap nantinya itu sebagian besar hanya sebagai buruh pabrik. Sehingga angkatan kerja Kabupaten Bantaeng

akan sulit berkompetisi dengan tenaga asing yang tentunya memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan arus modernitas industrialisasi.

2. Kabupaten Bantaeng bukan hasil bahan baku tambang

Industri pengolahan nikel (smelter) merupakan investasi utama yang ada di Kawasan Industri Bantaeng. Industri pengolahan nikel nantinya bakalan banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa total tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri pengolahan nikel ini (smelter) sebanyak 10.600 orang tenaga kerja. Namun satu hal yang mesti diperhatikan dalam industri pengolahan ini bahwa ketersediaan bahan baku merupakan faktor utama untuk kesinambungan industri ini agar tetap beroperasi. Hal ini merupakan menjadi salah satu ancaman atau pun kelemahan nantinya, karena dalam industri pengolahan nikel ini Kabupaten Bantaeng sebagai daerah yang bakalan memusatkan pengolahan nikel ini di Kawasan Industri Bantaeng tidak memiliki bahan baku berupa nikel atau dengan kata lain bahwa Kabupaten Bantaeng bukan penghasil nikel(bahan baku). Kabupaten Bantaeng hanya akan memanfaatkan pasokan bahan baku nikel dari Sulawesi Tenggara. Hal ini diperkuat dengan adanya nota kesepahaman antara kedua Pemerintah berupa *MOU*. Olehnya itu ini bakalan menjadi ancaman bagi Kawasan Industri Bantaeng itu sendiri jika sewaktu-waktu bahan baku berupa nikel yang dipasok dari Sulawesi

Tenggara ini macet atau berhenti menyuplai. Maka kondisi ini akan mengancam keberlangsungan operasional Kawasan Industri Bantaeng dalam hal ini smelter yang mengangakatungkan kurang lebih 10.600 tenaga kerja industry. Sehingga bisa jadi ada kemungkinan jika pasokan bahan baku berhenti secara otomatis industry pengolahan nikel pun akan berhenti beroperasi dan 10.600 tenaga kerja industry ini akan terancam untuk diberhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan hal ini maka pemerintah Kabupaten bantaeng hendaknya memikirkan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi beberapa hal yang bakalan mengancam keberlangsungan operasional Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Berdasarkan dari beberapa kelebihan dan kekurangan yang telah diapaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa prospek terhadap ketenakerjaan penanaman modal asing ini menjanjikan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta peningkatan sector matapencaharian lain disekitar kawasan industry tanpa menurunkan produktifitas sector ekonomi lainnya. Hal tersebut dikarenakan sector ketenagakerjaan lainnya seperti pertanian dan perikanan akan mendapatkan keuntungan langsung dari distribusi bahan pokok ke kawasan industry..

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Model penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng adalah penanaman modal asing langsung dengan bentuk kerja sama investasi joint venture dimana Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui PT.Bintang Selatan (Perusda) tergabung dalam konsorsium (joint venture) pengelola Kawasan Industri Bantaeng.
2. Industri Pengolahan Nikel (smelter) merupakan investasi utama di dalam Kawasan Industri Bantaeng kemudian menarik beberapa investasi pendukung yang pada hari ini membentuk sebuah kawasan industry Bantaeng
3. Kelebihan penanaman modal asing dalam sector ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Bantaeng, tumbuhnya sektor ekonomi baru di sekitar Kawasan Industri Bantaeng, adanya dana alokasi untuk mengembangkan APBD yang dapat disalurkan untuk sector ekonommi lainnya dan model kerjasama berupa *joint venture* yang memberikan andil kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam setiap pengambilan keputusan di kawasan Industri Bantaeng terutam yang ada hubungannya

dengan perekrutan tenaga kerja local sedangkan kekurangannya yaitu tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng tergolong rendah yang mengakibatkan penduduk bantaeng diasumsikan lebih banyak terserap pada posisi buruh yang memiliki penghasilan standar minimum dan Kabupaten Bantaeng bukan penghasil bahan baku tambang yang mampu menyebabkan tidak stabilnya arus produksi jika suplai sumber daya mengalami masalah.

4. Prospek terhadap ketenakerjaan penanaman modal asing ini menjanjikan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta peningkatan sector matapencarian lain disekitar kawasan industry tanpa menurunkan produktifitas sector ekonomi lainnya. Hal tersebut dikarenakan sector ketenagakerjaan lainnya seperti pertanian dan perikanan akan mendapatkan keuntungan langsung dari distribusi bahan pokok ke kawasan industry.

5.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebaiknya mendirikan sekolah kejuruan atau pun polititeknik untuk mempersiapkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bantaeng agar mampu terserap dan berkompetisi di dalam permintaan pasar tenaga kerja Kawasan Industri Bantaeng.

2. Pemerintah Kabupaten Bantaeng segera harus melakukan kerja sama dengan penghasil bahan baku lainnya untuk mengantisipasi berhentinya pasokan bahan baku dari Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Anoraga Pandji.1994. *Perusahaan Multi Nasional*, Semarang : Pustaka
Jaya

Daeng, Salamuddin. 2008. *Makro Ekonomi Minus (sebuah tinjauan kritis
penanaman modal di Indonesia)*, Jakarta: Institute for Global
Justice.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.2013.
Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantaeng.
Bantaeng

Dunn,William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*.
Yogyakarta: 1999.

Ikbar,Drs.Yanuar,M.A. 2006. *Ekonomi Politik Internasional 2*, Bandung :
Refika Aditma

Mardalis,Drs. 1989. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,
Jakarta: Bumi Aksara

Nawawi,Juanda. 2012. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*,
Makassar : CV Menara Intan

Suwanto Sukarnen. 2012. *Ventura Bersama (Joint Venture)*,Jakarta :
Salemba Empat

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi
di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,
Jakarta : Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Asing.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-
2032